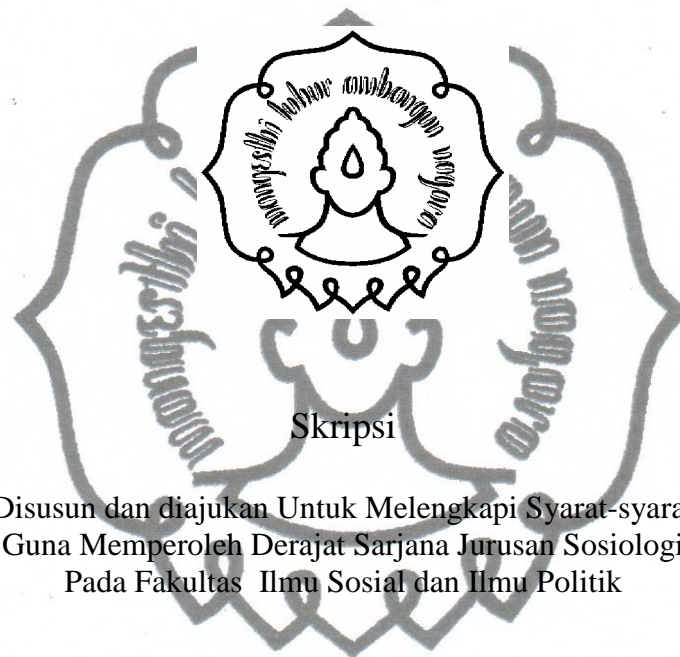


PEMBERDAYAAN DIFABEL
DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
(Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pemberdayaan Difabel Dalam Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa
Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar)



Skripsi

Disusun dan diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Jurusan Sosiologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

KARTIKA SURYA DEWI
D3207033

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

commit to user

HALAMAN PERSETUJUAN


Diajukan Untuk Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Argyo Demartoto', with a horizontal line underneath.

Drs. Argyo Demartoto, M.Si
NIP. 19650825 199203 1 003

PENGESAHAN

Telah Disetujui dan Diujikan Oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

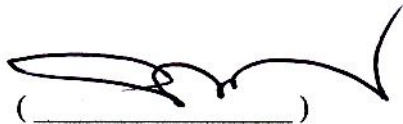
Hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

Ketua

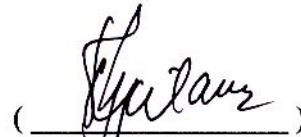
1. Drs. Y. Slamet, M.Sc, Ph.D
NIP. 19480316 197612 1 001



(_____)

Sekretaris

2. Drs. T.A. Gutama, M.Si
NIP.19650911 198602 1 001



(_____)

Penguji

3. Drs. Argyo Demartoto, M.Si
NIP. 19650825 199203 1 003



(_____)

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Drs. H. Supriyadi SN.SU

NIP.195301281981031001

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan ku persembahkan Skripsi ini Kepada :



- ♥ *Allah SWT*
- ♥ *Kedua Orang tua'ku*
- ♥ *Kakak dan Adik'ku*
- ♥ *My Lovely Hans*
- ♥ *Teman-teman 07*
- ♥ *Almamater*

MOTTO

Sesungguhnya Allah Tidak Akan Merubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Kaum Itu Sendiri Yang Akan

Mengubah Nasibnya

(Q.S Ar-Ra'ad : 11)

Tinggalkanlah Kesenangan Yang Mengahalangi Pencapaian Kecemerlangan Hidup Yang Diidamkan. Dan

Berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan Adalah Cara Gembira Menuju Kegagalan

(Mario Teguh)

Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia walaupun jalannya terjal berliku-liku. Dan apabila saayapnya

merengkuhmu, pasrah dan menyerahlah kepadanya walau pedang yang tersembunyi di sayap melukaimu.

Dan jika dia berbicara kepadamu, percayalah, walaupun ucapannya membuyarkan mimpimu, bagaikan

halilintar yang menyambar

(Kahlil Gibran)

Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah

Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik

Jangan menyerah... jangan menyerah...

(D'masiv)

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah dan limpahan rahmatNya yang telah diberikan kepada kita semua, serta Sholawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya hingga umat akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi, yang dilaksanakan sebagi syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis seringkali menemukan rintangan, hambatan serta halangan namun dengan adanya dukungan dan semangat dari berbagai pihak baik secara materiil maupun spirituil yang berwujud pengarah, bimbingan serta dorongan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang turut mendukung kelancaran penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, maka penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Supriyadi, SN. SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dra. Hj. Trisni Utami, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dra. L.V. Ratna Devi S, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Non Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Drs. Argyo Demartoto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan memberikan nasehat, arahan dan bimbingan.

5. Drs. T.A Gutama, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyalurkan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staff dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan pelayanan yang berkaitan dengan akademik.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu difabel anggota KUBE Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu yang sangat familiar dan terbuka dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, bapak Suryadi dan ibu Sri Dewi yang senantiasa memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta kasih sayang yang tak mungkin terbalaskan.
10. Kakak dan Adikku, Ghozali dan Mega untuk dukungan moril yang sangat berharga bagiku. Saudaraku Linda Puji yang selalu menemaniku saat suka maupun duka.
11. Kekasih hatiku, Hans Saputra yang menjadi sumber inspirasiku, yang memberikan cinta, dukungan dan motivasi yang tidak pernah berhenti, sampai akhirnya mampu meruntuhkan idealismeku, sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Teman-teman LASNIA; Suncong, Andi, Anton, Lilik, yang selalu mendukung sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
13. Teman-teman di Kuliah; Nindi, Ana, Endah, Abdul, Slamet, Bintang yang selalu mendukung dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.

14. Sahabatku Anisa dan Nuri yang telah memberikan motivasi, semangat, masukan, dan saran.
15. Teman-teman angkatan 2007 Sosiologi Non reguler, terimakasih atas kebersamaannya.
16. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Surakarta, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR MATRIKS	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LANDASAN TEORI	10
B. DEFINISI KONSEPTUAL	11
C. KERANGKA BERPIKIR	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN	53
1. Jenis Penelitian	53
2. Lokasi Penelitian.....	53
3. Sumber Data	53
4. Teknik Pengumpulan Data	54
5. Teknik Pengambilan Sampel ..	55
6. Validitas Data	57
7. Teknik Analisis Data	58
B. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	61
1. Keadaan Geografi	61
2. Keadaan Monografi	62
3. Profil Difabel	68
4. Gambaran Umum Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar ...	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN	76
1. Karakteristik Responden	76
2. Karakteristik Informan.....	80
3. Program Pemberdayaan Difabel di Kabupaten Karanganyar	83
4. Pemberdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar	100

5. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar	112
6. Dampak Program Pemberdayaan Difabel Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.....	129
B. PEMBAHASAN	133
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	148
B. IMPLIKASI.....	149
1. Implikasi Empiris	149
2. Implikasi Teoritis	150
3. Implikasi Metodologis	151
4. Implikasi Kebijakan	152
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA	157
B. LAMPIRAN 2 FOTO HASIL PENELITIAN	160
C. LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Dalam Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	63
Tabel 2	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun keatas)	64
Tabel 3	Penduduk Menurut Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun keatas)	65
Tabel 4	Penduduk Menurut Agama	66
Tabel 5	Sarana Komunikasi	67
Tabel 6	Sarana Transportasi.....	68
Tabel 7	Difabel menurut jenis kecacatan dan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008.....	69
Tabel 8	Difabel menurut jenis kelamin dan jenis kecacatan Di Kabupaten Karanganyar.....	70
Tabel 9	Banyaknya penyandang Kecacatan Di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2009.....	71
Tabel 10	Difabel menurut jenis kelamin dan kecacatan Di Desa Suruh tahun 2010.....	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Berpikir.....	51
Bagan 2	Teknik Analisis Data.....	59
Bagan 3	Struktur Organisasi	75



DAFTAR MATRIKS

Matriks 1	Karakteristik Responden.....	79
Matriks 2	Karakteristik Informan.....	82
Matriks 3	Program Pemberdayaan Difabel Kabupaten Karanganyar	99
Matriks 4	Strategi Pemberdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar	111
Matriks 5	Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pemberdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.	123
Matriks 6	Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar..	128
Matriks 7	Dampak Program Pemberdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.....	132
Matriks 8	Analisis Cara Pemberdayaan Difabel	137
Matriks 9	Prinsip Pemberdayaan Difabel	142
Matriks 10	Analisis Tiga Asas Pemberdayaan Difabel.....	147

ABSTRAK

KARTIKA SURYA DEWI, 2011, D3207033. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pemberdayaan Difabel Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pemberdayaan Difabel Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pemberdayaan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Pemilihan lokasi dikarenakan mengingat adanya difabel yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sehingga penulis mudah untuk memperoleh informasi atau data-data dari para responden dan informan mengenai Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Populasi dalam penelitian ini adalah kaum difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi visual berupa foto. Sedangkan pengambilan sampel dari penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berguna untuk menentukan sampel untuk tujuan tertentu saja yang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri populasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori aksi. Dalam teori aksi ini aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menerapkan pilihannya terhadap cara dan alat, tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih. Kemampuan memilih inilah yang disebut Parsons sebagai *voluntarism*. *Voluntarisme* adalah kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan.

Hasil penelitian ini bahwa pemberdayaan difabel melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan untuk memberdayakan difabel adalah dengan memberikan berbagai macam training keterampilan dan kewirausahaan untuk kemudian bisa dikembangkan oleh difabel sendiri, seperti pelatihan keterampilan menjahit yang diperuntukkan bagi difabel tuna daksa dan tuna rungu wicara yang ingin bisa menjahit. Selain memberikan pelatihan dan pendampingan strategi, juga dengan memberikan modal dan peralatan bagi difabel yang sudah mahir dan ingin membuka usaha sendiri. Dengan usaha yang mereka lakukan, difabel bisa hidup mandiri dari segi ekonomi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri maupun kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemampuan psikologi difabel dapat menumbuhkan semangat baru bagi difabel untuk tetap eksis dan survive dengan keadaan mereka sebagai difabel, selain itu juga untuk mengangkat moral difabel maupun kemampuan sosial difabel yaitu kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi difabel dengan masyarakat sekitarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia akan tetapi keberadaan mereka dalam kehidupan sehari-hari masih terpinggirkan. Masyarakat cenderung membelaskasihani daripada memberikan kesempatan pada difabel untuk bersemangat mandiri. Mereka dianggap golongan lemah, yang karena kecacatannya tidak mampu hidup mandiri sehingga perlu bergantung kepada belas kasihan orang lain. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, terisolir dan minder dari masyarakat. Terisolasinya penyandang cacat dari masyarakat umum juga disebabkan adanya sifat malu dari keluarga dengan kecacatan mereka. Padahal seperti layaknya manusia normal, mereka ingin diakui keberadaannya, ingin diperlakukan wajar serta ingin mendapatkan kebahagiaan dan kebutuhan lainnya. Dalam setiap diri manusia terdapat adanya kebutuhan sosial antara lain kebutuhan untuk diterima atau diakui dan dihormati serta untuk mengaktualisasikan diri (Nawawi, 1998).

Penyandang cacat sebagai warga Negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga Negara lainnya. Mereka memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri dalam rangka mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat”

Selain itu dinyatakan pula dalam pasal 31 ayat 1 bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Oleh karena itu penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam bidang pendidikan. Hal ini didukung oleh *commit to user* Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan nasional pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak mendapatkan pendidikan luar biasa”.

Difabel juga tidak kehilangan hal untuk memperoleh kesempatan kerja maupun hidup yang layak. Hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah perlu dicegah adanya diskriminasi yang merugikan para difabel, kaum muda, mereka yang berusia lanjut untuk memperoleh dan memiliki pekerjaan yang produktif yang memberikan imbalan yang layak. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi apapun atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Hal ini menunjukkan bahwa difabel mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan manusia yang tidak cacat.

Kesempatan untuk mendapat kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi difabel dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas yakni suatu kemudahan bagi difabel untuk mencapai kesamaan kesempatan tersebut. Dengan kesamaan kesempatan bagi difabel dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan akan mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial mereka. Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial menurut penjelasan Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang **Penyandang Cacat** adalah :

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi seorang warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara sesuai dengan Pancasila”.

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Proses pembangunan disegala

bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Edi Suharto, 1997:97).

Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang cacat (Depsos RI, 1996:17).

Pembahasan dan upaya-upaya pemberdayaan difabel yang dilakukan di Indonesia dewasa ini, tidak terlepas dari adanya strategi pembangunan sosial bagi kawasan ESCAP (Komisi Sosial Ekonomi bagi Kawasan Asia Pasifik) menjelang tahun 2000 dan masa sesudah itu oleh Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik ke IV mengenai kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial di Manila pada tahun 1991. Strategi tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan seluruh warga masyarakat dalam kawasan ESCAP, dengan sasaran dasar yang hendak diwujudkan meliputi pengentasan kemiskinan, realisasi keadilan yang merata dan peningkatan partisipasi warga masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, strategi diarahkan khusus secara langsung menyentuh kelompok-kelompok dari segi sosial kurang beruntung atau rawan di kawasan Asia Pasifik termasuk “warga difabel” (Agenda Aksi Dasawarsa Penyandang Cacat 1993-2003).

Dengan ditetapkannya agenda aksi untuk difabel tersebut maka segenap pemerintah di kawasan Asia Pasifik telah berkomitmen untuk terwujudnya peran serta penuh warga difabel. Indonesia sebagai salah satu anggota berupaya menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi difabel.

Peran pemerintah daerah memang sangat sentral dilihat dari sisi aksesibilitas fisik maupun nonfisik penyandang cacat. Kondisi riil para penyandang cacat selama ini dinilai belum mendapat kesempatan yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Bahkan umumnya masih meragukan dan belum mempercayai kemampuan para difabel untuk dilibatkan dalam berbagai aktivitas kehidupan, hal tersebut ditujukan ketika para penyandang cacat hendak melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum sering kali mendapat tanggapan kurang proposional.

Aksesibilitas bagi para difabel, aspek tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar, aspek tersebut merupakan salah satu yang perlu dicermati semua pihak dalam rangka mengangkat harkat dan martabat masyarakat difabel dalam kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara.

Permasalahan difabel timbul karena adanya gangguan pada fisik mereka yang menghambat aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi maupun politik sehingga mengurangi hak difabel untuk beraktivitas penuh dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Untuk memecahkan pokok permasalahan tersebut diperlukan dua pendekatan dasar yaitu memberdayakan mereka melalui usaha-usaha rehabilitas pendidikan, bantuan usaha dan sebagainya. Melalui upaya itu akan dicapai kondisi ilmiah, mental sosial, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sebagai modal dasarnya sehingga nantinya difabel tidak lagi sebagai obyek, tetapi dijadikan subyek dalam pembangunan.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi difabel dapat dilakukan dengan memberdayakan mereka dengan cara menggali potensi yang dimilikinya serta mengembangkan potensi tersebut sehingga mereka menjadi sumber data manusia yang produktif tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan kata lain, pemberdayaan difabel akan meningkatkan kemandirian difabel sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Atau pemberdayaan diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif

diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Menurut Craig dan Mayo (1995) partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Hikmat, 2001) seharusnya setiap penyandang cacat harus terlibat dalam proses pemberdayaan sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh penyandang cacat, semakin banyak kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat.

Terdapat berbagai jenis kecacatan antara lain cacat tubuh yang disebut tuna daksa, tuna ganda diberi makna penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental). Tuna grahita adalah cacat pikiran, idiot, lemah daya tangkap. Tuna netra menggantikan istilah buta atau tidak dapat melihat. Tuna rungu berarti tidak dapat mendengar. Jadi kecacatan pada diri seseorang bukan berarti kekurangan pada diri mereka tetapi merupakan potensi yang harus digali untuk terus dapat meningkatkan eksistensinya dalam masyarakat.

Kecacatan yang dimiliki oleh setiap penyandang cacat memang berpengaruh besar terhadap kehidupannya sehari-hari. Kecacatan salah satu fungsi anggota tubuh yang mereka derita menimbulkan berbagai keterbatasan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari, yang berarti mempersempit ruang gerak mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seseorang yang mengalami gangguan pada indera yang dibutuhkan, seseorang yang mengalami gangguan pada indera penglihatan akan berdampak pada kemampuan aktivitas yang bersangkutan menjadi terbatas, karena informasi yang diperoleh akan jauh berkurang dibandingkan dengan orang yang berpenglihatan normal. Seseorang yang mengalami gangguan pada indera pendengaran dan wicara akan berdampak pada kemampuan aktivitas yang bersangkutan menjadi terbatas. Mereka

mebutuhkan bahasa tertentu untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, yang bisa jadi tidak semua orang yang tidak cacat biasa menggunakan bahasa isyarat, sehingga secara tidak langsung akan menghambat komunikasinya dengan orang lain. Seseorang yang mengalami kecacatan pada kakinya (tuna daksa) juga berdampak pada kemampuan aktivitas yang bersangkutan menjadi terbatas, dia tidak bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Dia hanya bergantung pada kursi roda atau tongkat. Hal ini apabila tidak mendapat penanganan/ rehabilitasi khusus akan mengakibatkan timbulnya berbagai kendala psikologis. Oleh karena itu mereka perlu diberdayakan agar kecacatan yang mereka derita tidak menghalangi mereka untuk dapat menjalankan kehidupannya seperti halnya orang yang tidak cacat, sehingga keberadaan mereka tidak terisolir dari kehidupan masyarakat yang wajar. Pemberdayaan tersebut memerlukan peran serta dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun difabel itu sendiri.

Di samping itu yang tak kalah penting, mereka harus mendapat dukungan lingkungan serta tersedianya aksesibilitas fisik maupun non fisik. Yang sangat utama adalah penerimaan masyarakat yang sampai saat ini masih kurang kondusif. Secara ideal pemberdayaan difabel menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah melalui instansi terkait dan masyarakat, kondisi riil dilapangan peran pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah masih jauh dari apa yang diharapkan.

Sebagai wujud dari upaya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial difabel, maka pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang melakukan pemberdayaan difabel melalui program KUBE tersebut. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Program KUBE merupakan salah satu strategi Departemen

Sosial untuk memberdayakan difabel guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro. Program itu dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan kepada penyandang cacat, meliputi bisu tuli, tuna netra, bibir sumbing, cacat fisik keterlambatan mental, epilepsy dan sebagainya tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan asal usul penyandang.

Berdasarkan telaah dari latar belakang diatas, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam lagi tentang pemberdayaan bagi difabel melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan merujuk pada dasar berpikir tersebut, peneliti mengambil judul **“PEMBERDAYAAN DIFABEL DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)” (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pemberdayaan Difabel Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar).**

B. RUMUSAN MASALAH

Tetap berpegang pada latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penulisan ini, adalah :

“Bagaimanakah pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memberdayakan difabel sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dan penulisan ini, adalah Mendeskripsikan strategi pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Penelitian tentang strategi pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat memberikan manfaat dan kontribusi teoritis, metodologis, dan empiris bagi kepentingan akademis di jurusan sosiologi.

2. Manfaat praktis

Penelitian tentang strategi pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini diharapkan dapat menjadi :

- a. Bahan referensi terutama bagi pengambil kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial para difabel.
- b. Bahan referensi dan sekaligus merangsang minat peneliti lain untuk mengkaji masalah ini secara lebih mendalam lagi.
- c. Bahan referensi dalam rangka pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan kajian kesejahteraan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Aksi

Sesuai dengan tema yang diambil dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan adalah teori aksi. Dalam teori aksi ini aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menerapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih. Kemampuan memilih inilah yang disebut Parsons sebagai *Voluntarism*. *Voluntarism* adalah kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Konsep inilah yang menetapkan teori aksi Parsons ke dalam paradigma definisi sosial. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya individu selaku aktor.
- b. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan tertentu.
- c. Dalam mencapai tujuan aktor mempunyai alternatif cara, alat serta tujuan untuk mencapai tujuannya.
- d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuannya.
- e. Aktor berada dibawah kendali dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuannya serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuannya. (Ritzer,1995:56)

Jika dipandang dengan menggunakan teori aksi tersebut disini difabel adalah sebagai aktor yang memburu suatu tujuan yaitu bertujuan untuk memberdayakan difabel. Cara atau alat tersebut diimplementasikan dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

B. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Strategi Pemberdayaan

a. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 2005).

Beberapa ahli dibawah ini mengungkapkan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997:210-224):

- a) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, 1995).
- b) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994).
- c) Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).

- d) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya (Rapport, 1984). (Suharto, 1997:210-224).

Mengutip definisi yang dikemukakan oleh UNDP, *Empowerment* (pemberdayaan/ penguatan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah difabel ataupun komunitas. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat.

The common dictionary definition of empowerment, "to give official authority to: delegate legal power to: commission, authorize" (Grove, 1971, p. 744) is the one most understood by most people. As an example, Gandz (1990) writes, "empowerment means that management vest decision making or approval authority in employees where, traditionally, such authority was a managerial prerogative," (p. 75) however, this is not the definition of what is usually called employee empowerment. One author notes empowerment is, "easy to define in its absence-alienation, powerless, helplessness-but difficult to define positively because it 'takes on a different people and contexts" (Zimmerman, 1990, p.169). when most people refer to employee empowerment they mean a great deal more than delegation. It is for this reason that many authors provide their own definitions. some of these are vague, and meant to be so.

Block(1987) describes empowerment as "a state of mind as well as a result of positions, policies, and practices." (p. 65) one has to read an entire chapter to understand what he means when he says,

"to feel empowerment means several things. We feel our survival is in our own hands... we have an underlying purpose... we commit ourselves to achieving that purpose, now," (block, 1987, p. 65). Other authors (blanchard, carlos & Randolph, 1996; Blanchard & bowles, 1998) use their entire book to define empowerment. Still others provide an excellent perspective of effective empowerment without mentioning the word even once (freedman, 1998).

Kanter's (1993) theory of structural empowerment includes of discussion of organizational behavior and empowerment. According to this theory, empowerment is promoted in work environments that provide employees with access to information, resources, support, and the opportunity to learn and develop. Kluska et al., (2004) have noted that psychological empowerment includes feeling of competence, autonomy, job meaningfulness, and an ability to impact the organization. Employees who are empowered are more committed to the organization, more accountable for their work, and better able to fulfill job demands in an effective manner (Degner, 2005), Kanter's theory has been widely applied to the practice of professional nursing (Kluska et al., Mangold et al., 2006; Siu et al., 2005), showing how structures within the workplace that facilitate access to resources can empower employees to accomplish their work in more meaningful ways.

Definisi kamus secara umum mengenai "Pemberdayaan" berupa memberikan wewenang resmi untuk: menyerahkan kekuasaan yang sah untuk: mengangkat, mengesahkan" (Grove, 1971:744) adalah definisi yang paling banyak dianut oleh sebagian besar orang. Sebagai contoh, Gandz menuliskan "Pemberdayaan berarti manajemen member hak pengambilan keputusan atau hak istimewa manajerial. Akan tetapi, definisi tersebut bukanlah definisi dari apa yang biasanya disebut dengan pemberdayaan kerja. Seorang penulis menyatakan pemberdayaan itu, "mudah untuk didefinisikan dalam bentuk ketiadaannya-keterasingan, kelemahan, dan ketidakberdayaan-tetapi sulit untuk didefinisikan secara positif karena pemberdayaan terjadi pada bentuk yang berbeda di dalam komunitas dan konteks yang berbeda pula" (Zimmerman, 1990:169). Saat orang-orang membahas mengenai pemberdayaan kerja, maka yang mereka maksudkan adalah lebih dari sekedar penyerahan hak. Karena alasan inilah, banyak penulis yang memberikan definisi mereka masing-masing. Beberapa dari definisi tersebut tampak samar, begitu pula dengan maksud yang dikandungnya.

Block (1987) memaparkan pemberdayaan sebagai "suatu cara pandang seperti halnya hasil suatu keadaan, kebijakan, dan tindakan." (hlm.65). seseorang harus membaca seluruh bab yang ditulis Block untuk dapat memahami maksud dari

ucapannya berupa: “Untuk merasakan memberikan wewenang artinya ada pada beberapa hal. Kita merasa bahwa kelangsungan hidup kita ada di tangan kita sendiri... kita mempunyai suatu dasar tujuan... Kini, kita berkomitmen untuk meraih tujuan itu.” (Block, 1987:65). Penulis lainnya (Blanchard, Carlos & Randolph, 1996; Blanchard & Bowles, 1998) menggunakan seluruh buku mereka untuk mendefinisikan “pemberdayaan”. Meskipun demikian, beberapa penulis lain memberikan perspektif yang sempurna mengenai pemberdayaan efektif, bahkan tanpa menyebutkan kata “pemberdayaan” walau sekalipun (Freedman, 1998).

Teori Kanter (1993) tentang pemberdayaan structural meliputi pembahasan mengenai perilaku organisasional dan pemberdayaan. Menurut teori ini, pemberdayaan berkembang dalam lingkungan kerja yang menyediakan pekerjaannya dengan akses informasi, akses sumber daya, akses dukungan, dan akses peluang untuk belajar dan berkembang. Kluska dkk (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan psikologis meliputi perasaan kompetensi, otonomi, keberartian kerja, dan kemampuan untuk mempengaruhi organisasi. Pekerja yang diberdayakan menjadi lebih berkomitmen pada organisasi, lebih bertanggungjawab pada pekerjaan, dan bias lebih baik dalam memenuhi permintaan kerja dengan cara yang efektif. (Degner, 2005). Teori Kanter telah diterapkan secara luas dalam praktek perawat professional (Kluska dkk.; Mangold dkk., 2006; Siu dkk., 2005). Teori ini menunjukkan bagaimana struktur-struktur di tempat kerja yang memfasilitasi akses ke sumberdaya dapat memberikan hak pada pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang lebih berarti.

Empowerment (pemberdayaan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual maupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi, politik pada seorang difabel. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, diantaranya meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga

pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Menurut Kartasasmita pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dapat berkembang.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.
- c) Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. (Kartasasmita, 1995:19).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kekurangan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadilan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan, sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Prinsip Pemberdayaan

Dalam program pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya prinsip-prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut adalah landasan dasar yang harus dimiliki oleh seorang

pekerja sosial, masyarakat, dan harus terinternalisasi dalam diri pekerja sosial yang bergerak dalam konteks masyarakat. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip yang akan disuguhkan disini saling berkaitan satu sama lain.

Beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 1997 : 216-217).

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial harus bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu kepada masyarakat.
- e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif ; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

(Suharto, 2005: 68-69).

Menurut Kiefer (1981) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi: kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif (Soeharto, 1997: 215).

Selain itu Parsons (1994) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

- a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri orang lain.
- c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. (Parsons, et.al., 1994 :106).

3. Strategi Pemberdayaan

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, makro.

a. Asas Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. *Asas Mezzo.*

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

c. *Asas Makro.*

Pendekatan ini disebut juga strategi sistem besar (*large- system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijaksanaan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lowbbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Suharto, 2005 : 66-67).

Pemberdayaan dengan demikian menciptakan suatu kondisi masyarakat yang dapat meraih keberkuasaan sehingga dirinya tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat kurang beruntung. Menurut Ife setidaknya yang dapat diterapkan untuk dapat memberdayakan suatu masyarakat, yakni : perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*), aksi sosial dan politik (*social and political action*), dan peningkatan kesadaran dan pendidikan (*education and consciousness raising*). (Ife, 1995:63)

Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dilakukan untuk mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ketidakberdayaan seringkali terjadi karena adanya sumber kehidupan yang terbatas. Perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk

menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai suatu keberdayaan. Misalnya, kebijakan membuka peluang pekerjaan yang luas atau penerapan upah minimum regional yang tinggi dapat diberikan dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Dalam pandangan kelompok 'elit' sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena faktor politik. Kebijakan untuk kesejahteraan rakyat ditentukan oleh kekuatan politik. Sayangnya, tidak jarang ditemukan sistem politik yang tertutup dan tidak memberikan peluang masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang yang besar dalam memperoleh kondisi keberdayaan.

Terakhir, strategi pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan. Masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan diperparah dengan tidak adanya keterampilan untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk menghadapi masalah ini peningkatan kesadaran dan pendidikan dapat diterapkan. Contohnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana struktur-struktur penindasan terjadi atau memberikan sarana dan keterampilan agar mencapai perubahan secara efektif.

2. Difabel

1. Pengertian Difabel

Difabel biasa disebut cacat. Kecacatan adalah kerusakan kemampuan untuk kehidupan dan pekerjaan yang disebabkan oleh luka penyakit atau cacat sejak lahir (Suparlan dkk, 1983:53). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecacatan tidak menyangkut hal mengenai kehilangan kemampuan tetapi lebih bersifat kerusakan kemampuan sebagai akibat dari kerusakan fungsi alat tubuh yang

menyebabkan kesulitan dalam beraktifitas seperti manusia normal, sehingga jika diberi upaya penanganan khusus sesuai dengan jenis kecacatannya maka kemampuan beraktifitas tersebut dapat ditingkatkan.

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1997 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja: “Cacat adalah keadaan hilangnya atau berkurangnya fungsi anggota badan secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.” Adapun yang dimaksud dengan penyandang cacat berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998 diartikan sebagai berikut:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.”

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Booklet Ministry of Affairs, kecacatan didefinisikan sebagai:

“Kesulitan/ kesukaran dalam kehidupan pribadi keluarga, masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologi, maupun tubuh dan ketidakmampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.”

Sedangkan definisi cacat/ kecacatan berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

commit to user

Faktor kecacatan secara umum dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a) Faktor keturunan, karena tingginya mekanisme gen yang terganggu.
- b) Faktor cacat sejak lahir, dikarenakan infeksi, kurang gizi, polio.
- c) Faktor cacat yang diperoleh, dikarenakan hal-hal yang bersifat kecelakaan seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pekerjaan
(Analisis Pekerjaan No.3 tahun III/ 1983).

Setelah mengetahui definisi cacat/ kecacatan, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian penyandang cacat. Berdasarkan Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat bahwa Sedangkan macam kecacatan terdiri dari:

- 1) Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.
- 2) Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.
- 3) Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Ada banyak *terminology* yang digunakan sebagai julukan atas keberadaan seseorang yang mengalami kecacatan baik cacat fisik maupun mental antara lain seperti penderita cacat, penyandang cacat, orang yang berkelainan, anak luar biasa, invalid dan sebagainya. Belum lama ini kenalkan istilah difabel yang dirasa lebih memiliki keadilan dan memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Terminologi difabel adalah akronim dari *people with different ability* dan kemudian digunakan sebagai istilah pengganti penyandang cacat. Istilah penyandang cacat dan beberapa istilah lain yang disebutkan diatas, dinilai mengandung arti diskriminasi dan memiliki kecenderungan sebagai alasan oembenar pada stigma dan *stereotype* atas keberadaan difabel dalam masyarakat. (Demartoto,2005:11).

Penyandang cacat dalam prespektif ideologi kenormalan. Ideologi (ajaran) kenormalan menyatakan bahwa seseorang disebut normal adalah bila mempunyai organ tubuh lengkap dan berfungsi dengan baik, harus mempunyai kepala, kaki/tangan dan organ lain layaknya seorang manusia. Kaki dapat digunakan untuk berlari, tangan untuk memegang atau menulis, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya. Seseorang yang mengalami ketidakngsian, kehilangan salah satu atau lebih organ yang dimilikinya, maka orang tersebut tidak sempurna atau istilah yang sering digunakan selama ini adalah cacat. Kesempurnaan organ tubuh dan berfungsi sebagaimana mestinya adalah syarat yang tidak dapat ditawar, agar diri dapat dikatakan gagah, perkasa, *gentle*, seksi, menawan dan lain-lain. Ideologi kenormalan memperlihatkan arogansi orang normal yang memandang orang cacat sebagai kelompok lemah yang tak berdaya. Pandangan ini telah memposisikan penyandang cacat lebih rendah dari orang normal yakni memiliki kelengkapan fisik dan dapat berfungsi dengan baik. Padahal penyandang cacat seharusnya dinilai dari aspek lain seperti kemampuan dan kecerdasan yang belum tentu dimiliki oleh orang normal (Demartoto, 2005:12).

Pandangan ideologi kenormalan yang menilai kesempurnaan tubuh seseorang sebagai tolak ukur dapat tidaknya seseorang disebut orang normal, bertolak belakang dengan penilaian Foucault mengenai tubuh manusia. Menurut Foucault, tubuh adalah tempat paling esensial untuk mengamati penyebaran dan beroperasinya relasi-relasi kekuasaan dalam masyarakat barat modern. Tubuh adalah tempat dimana praktek-praktek sosial yang paling lokal dan mikro mempertautkan dirinya dengan sirkulasi kekuatan impersonal dalam skala besar.

Didalam buku *Madness and Civilization* (1964) Foucault mengartikan kegilaan sebagai kebenaran pengetahuan, sedangkan pengetahuan dan proses belajar orang waras menjadi ketololan yang *absurd*. Pengetahuan si gila dengan hikmah konyolnya senantiasa memahami kebenaran tersebut. Terkait dengan teori kegilaan, Foucault

merujuk pada era klasik abad ke 18 dan ke 19 di Eropa untuk menunjukkan bahwa kegilaan merupakan obyek persepsi yang dihasilkan oleh praktik-praktik sosial ketimbang sebagai obyek pemikiran atau perasaan yang dapat dianalisa.

Menurut Foucault, sebelum era klasik hubungan antara akal budi dan kegilaan sangat berbeda. Terdapat empat fase historis dan empat persepsi yang berbeda tentang kegilaan.

- 1) Kegilaan versi abad pertengahan dimana pengalaman kegilaan tenggelam oleh tema tentang kejatuhan manusia, kehendak tuhan, sifat kebinatangan dan kiamat. Kematian merupakan tema dominan. Kegilaan tidak menjadi obyek pengamatan, sementara kuasa kematian begitu dekat karenanya yang lebih penting adalah mengembalikan kepada si gila kebijakan tentang kematian itu.
- 2) Kegilaan muncul di permukaan baru pada akhir abad ke 15, dimana manusia tidak gila dengan ketakterhindarkannya dari kematian sebab kematian terletak di jantung kehidupan itu sendiri. Sejak abad ke 15 subyek ditangani berbeda-beda oleh sastra, filsafat dan seni. Pengalaman kegilaan lebih sebagai “*satire moral*” ketimbang ancaman wabah seperti gambaran para pelukis.
- 3) Era klasik yakni mereduksi kegilaan yang dianugerahkan renaissans kepada kebebasan imajiner menjadi kebisuan. Reduksi ini termuat dan terkait dengan nalar, moral dan hukum. Akhir abad ke 18, pembaru-pembaru psikiatri melihat tindakan penyiksaan bukan merupakan tindakan penyembuhan yang tepat. Orang gila dibebaskan secara fisik dan diberi pendidikan moral dan kuliah psikiatri. Akan tetapi, sebenarnya subyek menjadi lebih tidak bebas karena kini pikiran mereka yang justru menjadi subyek penyembuhan. Antara berakal dan tak berakal mulai dipilah-pilah. Bahasa psikiatri digunakan sebagai monolog penalaran tentang kegilaan.
- 4) Abad ke 19 terjadi pembungkaman terhadap kegilaan seperti dilakukan Sigmund Freud yang menghancurkan rezim bisu yang diterapkan para pembaru. Menurut

Foucault, satu-satunya jalan bagi kegilaan untuk hidup dalam dirinya diluar wewenang nalar adalah melalui seni dan filsafat.

(Demartoto, 2005:14-15).

Pandangan Foucault mengenai kegilaan tampak bahwa penekanan terhadap tubuh lebih sebagai obyek persepsi dalam mewujudkan praktik-praktik sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri secara berbeda-beda. Tampak jelas bahwa kecacatan fisik bukan hal yang utama dalam membicarakan tubuh sebagai tempat yang paling esensial untuk mengamati penyebaran dan beroperasinya relasi-relasi kekuasaan.

2. Pengembangan program pemberdayaan berperspektif difabel oleh Dinas Sosial.

Ada dua hal pokok yang selalu menjadi pertimbangan dalam menyusun program dalam pemberdayaan berprespektif difabel. Dua hal pokok diri maupun mereka yang merasa menjadi manusia normal. tersebut adalah :

- a) Pertama, program yang menekankan pada kepentingan pragmatis untuk menjawab kebutuhan praktis sesaat bagi difabel maupun masyarakat yang sering terlihat dalam rehabilitasi saat ini.
- b) Kedua, program yang menekankan pada kepentingan jangka panjang yang menjawab kebutuhan strategis difabel, yaitu memperjuangkan posisi dan hak difabel terhadap ideologi difabel, kenormalan dan pandangan negatif yang telah mengakar dalam keyakinan baik dikalangan difabel itu sendiri maupun mereka yang merasa menjadi manusia normal.

Dalam menjawab kebutuhan praktis program pemberdayaan sudah banyak dikembangkan oleh berbagai lembaga dan ahli yang bekerja dalam bidang rehabilitasi.

Berbagai pelayanan rehabilitasi biasanya di kelompokkan dalam empat kategori yaitu :

commit to user

- 1) Rehabilitasi Medis,

Rehabilitasi medis banyak dilakukan oleh rumah sakit umum, rumah sakit khusus oleh rumah sakit khusus ortopedi dan berbagai jenis klinik.

2) Rehabilitasi Karya

Rehabilitasi karya menekankan pada vokasional training untuk persiapan difabel dalam dunia kerja yang banyak dilakukan oleh *shelter workshop*, loka bina karya dan panti rehabilitasi karya.

3) Rehabilitasi Pendidikan

Rehabilitasi pendidikan dilakukan disekolah untuk anak cacat. Seperti sekolah Luar Biasa (SLB) sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan sekolah terpadu.

4) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial biasanya dilakukan untuk membantu difabel bersosialisasi di masyarakat.

Kalau kita cermati, program-program rehabilitasi diatas selalu ditujukan kepada difabel sebagai target group yang dianggap lemah, tidak berdaya dan tidak mandiri. Sedangkan para petugas di rehabilitasi seolah-olah menjadi malaikat-malaikat pemberdaya yang tahu dan mampu memberdayakan difabel. Perlakuan khusus terhadap difabel tersebut menciptakan pengkotak-kotakan di kalangan difabel sendiri dan di masyarakat. Difabel dikelompokkan menurut jenis dan derajat difabelnya agar mempermudah upaya rehabilitasi.

Peran difabel ini semakin jauh dari kehidupan masyarakat dan akan membentuk kelompoknya sendiri. Akibat dari situasi ini menciptakan kesulitan bagi difabel untuk melakukan sosialisasi di masyarakat. Sering tidak disadari bahwa masalahnya tidak hanya karena difabel yang dialami seorang cacat sehingga dia tidak bisa sekolah, bekerja dan bersosialisasi di masyarakat. Tetapi masalah terbesar muncul justru dari masyarakat, orang-orang non *cacat* yang tidak memahami hak-hak difabel, yang berlaku diskriminatif dan berprasangka negatif terhadap difabel. Untuk menjawab

permasalahan tersebut tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan praktis sesaat, tetapi perlu upaya-upaya ke depan yang memenuhi kebutuhan strategis yang dapat menjawab pemenuhan hak-hak dan posisi difabel yang lebih luas dan signifikan di masyarakat.

Untuk itu, dibutuhkan perubahan paradigma yang lebih mendasar dari isu difabel itu sendiri. Isu difabel yang bersifat individual sehingga pelayanannya berupa perlakuan khusus rehabilitasi bagi difabel harus berubah ke arah isu difabel yang bersifat sosial. Perubahan yang mengarah pada pola perilaku sosial masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya difabel. Isu difabel sebagai isu sosial berarti merubah target grup bukan hanya difabel secara eksklusif tetapi seluruh anggota masyarakat. Hal ini berarti juga melakukan pendekatan pemecahan masalah difabel yang bersifat integratif, terpadu atau inklusif dalam program-program pembangunan secara menyeluruh (*intergrated solution*).

Program pemecahan terpadu ini bukan akan menggantikan peran lembaga rehabilitasi akan tetapi, merupakan program yang dilakukan secara terpadu dalam rangka menyelesaikan masalah difabel secara menyeluruh (*holistik*). Pendekatan ini menempatkan peran semua pihak (peran difabel, peran keluarga dan masyarakat di sekitar difabel, peran kelompok profesional, peran negara). Sesuai porsinya dalam menyelesaikan masalah difabel secara menyeluruh.

a) Peran difabel

Peran difabel menjadi sangat penting karena merekalah yang sebenarnya menjadi obyek pemberdayaan. Jika selama ini difabel baru berperan sebagai obyek maka ke depan kecacatan haruslah mampu menjadi subyek bagi dirinya sendiri dalam pembangunan yang dilaksanakan. Dengan menjadi subyek maka difabel memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dan terlibat dalam proses perencanaan, pembuatan, pelaksanaan, monitoring dari keputusan-keputusan yang berdampak bagi dirinya.

b) Peran keluarga dan masyarakat di lingkungan difabel

Keluarga difabel dan masyarakat di lingkungan difabel memiliki peran strategis bagi terwujudnya visi kecacatan yang sedang diperjuangkan. Hal ini berkaitan dengan pentingnya dukungan mereka terhadap keterlibatan kecacatan dalam kehidupan.

c) Peran kelompok profesional

Masyarakat profesional ini bisa terdiri dari NGO-NGO baik NGO yang bergerak di bidang kecacatan dan NGO yang bergerak diluar kecacatan, lembaga donor, perusahaan dan lembaga/ institusi rehabilitasi yang memiliki konsistensi untuk mewujudkan hak asasi manusia yang universal. Peran mereka dalam mewujudkan visi kecacatan menjadi penting. Kelompok ini memiliki kemampuan khusus untuk mendukung perwujudan visi kecacatan. Dalam mewujudkan visi kecacatan peran yang diharapkan dari masyarakat profesional adalah sebagai fasilitator yang akan memfasilitasi difabel dan masyarakat di sekitar difabel untuk menganalisa masalah dan kebutuhan mereka.

d) Peran negara

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya sebagai perwujudan hak asasi manusia. Negara diharapkan memiliki peran untuk menyusun kebijakan tentang aksesibilitas bagi difabel baik secara fisik maupun non fisik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat usulan-usulan program pembangunan yang memiliki perspektif kecacatan dan membangun fasilitas umum yang aksesibel terhadap difabel.

(Teamwork Interaksi, 2007:10-14).

3. Konsep Dasar Kecacatan

a) Model Individual

commit to user

Model ini memandang difabilitas disebabkan karena adanya keterbatasan fisik, intelektual dan alat pancaindera. Asumsi yang muncul bahwa untuk memulihkan kondisi difabel tersebut dengan mengurangi penderitaan mereka dan mengusahakan kembali untuk menjadikan keadaan difabel senormal mungkin.

Cara pandang yang berkembang di masyarakat terhadap difabel dikenal sebagai penderita cacat. Cara pandang ini ternyata berdampak negatif pada kehidupan difabel di masyarakat. Cara dari nama ini menumbuhkan konstruksi sosial cacat.

b) Model Sosial : konstruksi sosial difabel

Pada dasarnya istilah cacat merupakan suatu kata yang tidak memiliki makna netral melainkan sarat akan ideologi yang berarti ketidakmampuan dalam arti tidak normal. Dengan begitu cacat berarti tidak mampu dan tidak normal. Lawan cacat adalah mampu dan normal yang berarti tidak cacat baik cacat fisik maupun mental dan oleh karenanya dipandang sempurna dan memiliki kemampuan. Apakah benar bahwa difabel adalah tidak normal? Pertanyaan kedua adalah apakah kecacatan seseorang selalu berkaitan dengan ketidakmampuan? Secara teoritik dan empirik bahwa kecacatan selalu dikaitkan dengan ketidaknormalan dan ketidakmampuan, maka masalah difabel sebenarnya adalah konstruksi sosial.

Untuk memahami ideologi ini yang pertama harus dipahami konsep cacat pada dasarnya berkaitan dengan tidak berfungsinya salah satu bagian dari seseorang baik fisik maupun psikis. Hal ini tidak ada kaitannya dengan mampu atau tidak mampu seseorang secara keseluruhan. Misal seseorang secara keseluruhan. Misalnya seseorang yang lumpuh di kursi roda, dia masih bisa melakukan mobilitas, masih mampu berpikir, mampu berkomunikasi dan berkarya. Orang yang kakinya patah keduanya tidak berarti tidak mampu melakukan fungsi

berjalan kalau berjalan diartikan sebagai kegiatan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu pula orang yang tidak mampu untuk melihat berarti dia tidak akan mampu membaca seperti layaknya orang yang normal, tetapi jika sarannya terpenuhi seperti huruf braile atau kacamata minus bagi orang yang matanya minus sangat diperlukan karena tanpa kacamata tersebut orang yang matanya minus tidak akan mampu untuk membaca. Apakah orang yang mampu membacanya harus dengan bantuan alat seperti kacamata itu cacat? Dengan melihat ilustrasi ini sudah dapat dilihat bahwa ketidakmampuan salah satu organ tubuh (cacat) tidak ada korelasinya dengan kemampuan secara keseluruhan.

Yang kedua adalah konsep “normal” itu sendiri. Orang normal adalah kelompok orang yang memiliki anggota tubuh yang secara fisik komplit, pertanyaannya adalah mengapa banyak orang yang salah satu atau lebih bagian tubuhnya tidak berfungsi semestinya tidak mendapat julukan cacat seperti penderita gagal ginjal, jantung, stroke demikian pula seseorang yang memiliki cacat mental seperti pencuri, koruptor, penipu, pelanggar HAM tetap dianggap normal.

Dengan demikian cacat dan normal adalah konstruksi sosial yang tidak menggambarkan realitas sosial secara obyektif. Masyarakat telah membuat pengotakan/ pengelompokan terhadap difabel dengan cara menghambat mereka berpartisipasi penuh di dalam masyarakat. Oleh karenanya diperlukan suatu perubahan paradigma masyarakat tentang difabilitas.

Konstruksi sosial yang telah langgeng beratus-ratus tahun atau mungkin berabad-abad ini seolah-olah telah menjadi pemaknaan yang paling benar. Difabel dipandang sebagai sosok yang tidak mampu dan tidak normal. Perilaku “normal” yang muncul adalah punya kewajiban mengasihani, menyantuni dan membina. Sebaliknya konstruksi sosial tentang ketidaknormalan juga secara tidak langsung

tersosialisasikan dan mempengaruhi psikologi mereka yang dianggap difabel. Akibat tekanan psikologis dari masyarakat maka berakibat difabel mengamini bahwa dirinya tidak mampu dan tidak normal.

Konstruksi sosial yang memandang bahwa difabel ini tidak mampu dan tidak normal ini melahirkan adanya ketidakadilan dan hambatan di segala bidang. Hambatan-hambatan tersebut sangat luas dampaknya hingga mempengaruhi kualitas hidup mereka. Adapun bentuk ketidakadilan tersebut terwujud dalam:

1) Marginalisasi difabel

Ketidakadilan pertama adalah bentuk proses marginalisasi atau pemiskinan bagi difabel. Pemiskinan ini akibat diskriminasi yang dilakukan mulai dari keluarga, masyarakat bahkan negara. Difabel dianggap tidak normal dan tidak mampu. Input yang diberikan adalah dilatih keterampilan tetapi tidak diperoleh kesempatan yang sama didalam lapangan kerja.

Pendidikan yang disediakan oleh negarapun tidak diintegrasikan dengan semua warga belajar lain. Sebagian besar skill dasar bukan transfer ilmu pengetahuan sesungguhnya diperoleh. Pemiskinan lain yang sangat mendasar lain adalah ditutupnya semua akses pembangunan.

2) Sub Ordinasi

Banyak orang tidak memberikan kepercayaan pada difabel untuk memimpin atau mengambil keputusan, bahkan difabel lebih sering ditempatkan ditempat yang tidak penting. Sub ordinasi ini tidak hanya terjadi di kalangan keluarga dan masyarakat namun sampai kepada tingkat pemerintah dan negara. Pada konsep pendidikan misalnya, difabel harus bersekolah di sekolah khusus tetapi penyediaan sekolah khusus tersebut hanya ada di perkotaan dan sebagian besar hanya sampai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sebenarnya terdapat sekolah terintegrasi

commit to user

dalam warga belajar tanpa diskriminasi tetapi pelaksanaannya sampai saat ini hanya sebatas pilot proyek saja.

Masih banyak difabel yang akan melanjutkan ke sekolah tingkat atas terhambat karena adanya penolakan-penolakan dari pihak sekolah.

3) *Stereotype*

Stereotype adalah pelabelan pada suatu kelompok tertentu yang selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Sumber *stereotype* pada difabel adalah difabel tidak normal. Banyak *stereotype* yang diberikan pada difabel misalnya karena label orang cacat tidak mampu maka banyak perlakuan pada difabel, bahwa difabel itu peminta-minta, pengemis sehingga masyarakat bersikap mengasihani akhirnya memberikan sedekah dan sebagainya.

4) Kekerasan terhadap difabel

Kekerasan non fisik atau terselubung yakni kekerasan dalam bentuk pelecehan terhadap orang cacat yang berimplikasi secara emosional dan sosial. Terdapat beberapa bentuk kekerasan terselubung yang bisa di kategorikan sebagai pelecehan terhadap difabel, seperti menyampaikan lelucon pada difabel yang dirasakan sangat vulgar (terbuka) atau membuat malu dengan membuat sebutan tertentu. Kesulitan mengungkapkan jenis kekerasan ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya bersembunyi dibalik gengsi keluarga, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultur. Kekerasan lain adalah kekerasan struktural. Yang masuk kekerasan struktural adalah peraturan-peraturan pemerintah, norma maupun nilai di masyarakat dan negara maupun sarana prasarana fisik yang membuat difabel tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana yang ada. Kekerasan struktural ini lebih sulit diidentifikasi namun memiliki dampak penyingkiran yang sistematis terhadap difabel, misalnya perencanaan kota yang tidak mempertimbangkan

terhadap aksesibilitas bagi para difabel adalah suatu bentuk kekerasan struktural. Demikian halnya perencanaan pembangunan sarana umum seperti sekolah pemerintah, bank dan sebagainya.

(Demartoto, 2005: 20-25).

Pembangunan nasional khususnya pembangunan sosial tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang antara lain menyatakan:

“Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak-banyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”.

Partisipasi masyarakat merupakan sumberdaya yang paling penting dalam tata usaha kesejahteraan sosial. Tetapi bagi para difabel partisipasi dalam masyarakat akan menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan jika para difabel ini tidak diberikan suatu penyadaran tentang potensi yang masih mereka miliki karena sebagian besar para difabel sudah kehilangan semangat untuk memberdayakan diri mereka sendiri di dalam masyarakat selain itu juga anggapan negatif masyarakat yang dilekatkan kepada para difabel yang memandang para difabel ini sebagai orang yang cacat tidak sebagai orang yang memiliki perbedaan kemampuan, yang akhirnya dengan *stereotype* (label) yang diberikan kepada para difabel ini secara otomatis membuat para difabel tidak diperhitungkan kemampuannya dalam setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara tidak langsung telah mengucilkan para difabel dari masyarakat.

Sementara itu banyak sekali ketidakadilan difabel akibat dari *stereotype* yang disandangkan kepada para difabel. Misalnya saja tanggapan bahwa orang cacat itu tidak mampu, maka banyak perlakuan anggota keluarga atau masyarakat yang justru menyingkirkan difabel. Bahkan lebih dari itu kekerasan terhadap difabel sering terjadi

selain kekerasan fisik seperti pemasangan, pemukulan, pengucilan dengan jalan penyembunyian, pemerkosaan, bentuk-bentuk pelecehan juga sering diterima oleh para difabel. Selain kekerasan fisik juga kekerasan yang dikenakan secara struktural. Yaitu segenap peraturan, norma dan nilai di masyarakat dan negara, maupun sarana prasarana yang membuat difabel tidak memiliki akses terhadap sarana dan prasarana tersebut.

Difabel dari segi kuantitas merupakan kaum minoritas di dalam masyarakat, tetapi mereka masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial tetapi karena perbedaan kemampuan yang mereka miliki mereka (para difabel) membutuhkan suatu proses khusus untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki di dalam masyarakat. Dan sebagai bagian dari masyarakat mereka juga harus dilihat sebagai sumberdaya manusia seperti masyarakat lainnya. Menurut UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di semua segi kehidupan. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak-Hak Para Penyandang Cacat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1975 yang antara lain menyebutkan bahwa difabel memiliki hak yang sama dalam masyarakat, termasuk hak untuk berperan serta dan ikut memberikan sumbangan pada semua segi kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Hak-hak difabel jika dilihat dari UU No. 4 Tahun 1997 seharusnya sama dengan masyarakat lainnya yang antara lain berupa hak untuk mendapat pendidikan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, ekonomi, politik, budaya dan sosial. Tetapi pada kenyataannya pandangan masyarakat yang negatif terhadap difabel membuat kelompok minoritas ini sulit untuk mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Menurut Mansour Fakhri ada kelompok masyarakat yang tidak mau tahu terhadap para difabel ini, tetapi ada sekelompok masyarakat lain yang merasa perlu untuk berbuat sesuatu kepada para difabel.

Dari kelompok yang kedua ini timbul tiga jenis kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran berbeda, yaitu:

a) Kelompok Pertama

Kelompok pertama menganggap para difabel itu ada karena takdir. Siapapun tidak dapat mengubah kepastian Tuhan tersebut. Kelompok ini bersifat konservatif dan menjinakkan. Oleh sebab itu bantuan yang diberikan berupa doa, serta berusaha menjadikan para difabel sebagai orang yang pantas dikasihani dengan demikian akan banyak pihak yang bersedia menolong. Kelompok ini adalah kelompok dengan kesadaran magis (*magical consciousness*).

b) Kelompok Kedua

Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang mempunyai sifat liberal dengan janji-janji yang memabukkan. Mereka menyebarluaskan paham yang menyatakan bahwa yang mampu itulah yang nantinya akan menang dalam persaingan hidup. Dengan demikian mereka menyatakan para difabel itu memiliki kemampuan yang sama dengan anggota masyarakat lain. Mereka dapat bersaing dengan kelompok manusia yang lain jika mereka dilatih, didik dan diberikan kesempatan serta perlakuan yang sama dengan anggota masyarakat yang lain, tanpa tidak memperhatikan perbedaan kemampuan masing-masing individu. Bantuan yang diberikan biasanya berupa beasiswa, pelatihan, pendidikan. Karena perlakuan yang diberikan kepada kelompok difabel disamakan dengan anggota masyarakat yang lain maka kelompok ini disebut kelompok orang yang memiliki kesadaran naif (*naives consciousness*).

c) Kelompok Ketiga

Kelompok ketiga menyatakan bahwa orang cacat itu tidak ada, sedang yang ada adalah orang yang dicatikan dan tidak diberi kesempatan untuk memiliki kemampuan, kelompok ini mengakui adanya perbedaan pada masing-masing

individu sehingga individu memiliki kebutuhan berbeda; dengan demikian mereka harus difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat berkembang seoptimal mungkin perlakuan yang diberikan kepada difabel berupa pemberdayaan dan advokasi untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kelompok inilah yang disebut kesadaran kritis. Oleh karenanya penyebaran ideologi kesadaran kritis harus dilakukan.

(Team Work Interaksi, 2007:10-12).

3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik, dan merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, seperti mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Bessant, Watts, Dalton dan Smith: 2006).

Kebijakan dalam kesejahteraan sosial sangat dituntut untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang belum maju (*regress*) ke pola pikir yang maju (*progress*). Untuk mengubah itu semua dituntut adanya kebijakan dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah kebijakan publik. Menurut Ahrens (1997) dalam Kebijakan publik ada 5 (lima) karakteristik yang perlu dilihat antara lain: *kredibel* (dapat dipercaya), *accuntable* (bertanggung jawab), *partisipan* (peran serta), *prediktif* (ramalan) dan *transparan* (terbuka).

Dari konsep kebijakan publik ini dituntut agar pemegang kekuasaan bisa diterima oleh publik apakah itu eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (wakil rakyat) agar menjadi pembuat kebijakan (*policy makers*) yang profesional.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial dan dapat pelayanan sosial dari negara. Sudahkah masyarakat Indonesia sejahtera? Jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Namun apabila dilihat pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 34 ayat (1), mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Kesejahteraan Sosial menurut Segel dan Bruzy (1998), "Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat".

Sedangkan Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama: Pertama, ketika masalah sosial dapat *dimanage* dengan baik. Kedua, ketika kebutuhan terpenuhi dan Ketiga ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

- 1) Setiap orang belum tentu memiliki kemampuan management yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapi. Kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.
- 2) Setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan *commit to user* dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.

- 3) Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu ada langkah memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Ketika individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat memenuhi ketiga syarat utama diatas, maka dia sudah dapat disebut sejahtera. Menurut Richard Titmuss (1974) lawan dari kesejahteraan sosial adalah "*social illfare*" (ketidaksejahteraan sosial). Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, hal itu dapat menyebabkan "*social illfare*" dalam masyarakat.

Pengertian lain juga dapat dikembangkan dari hasil *Pre-Conference Working for the 15 th International Conference of Social Welfare* yakni :

"Social welfare is all the organized social arrangements wich have as their direct and primary objective the well being of people in social context. It includes the broad range of policies and service wich are concerned with various aspects of people live thir income, securiry, health, housing, education, recreation, cultural tradition, etc."

(Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya).

(Sulistiati, 2004:25)

Dalam konteks Indonesia sendiri, kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial yang baru disahkan pada 18 Desember tahun 2008 sebagai pengganti terhadap UU

No. 6 Tahun 1974 juga tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Tetapi, kesejahteraan sosial pada dasarnya juga dapat dipahami dalam dua konteks yang lain, yakni sebagai sebuah institusi (*institutions*) dan sebagai sebuah disiplin akademik (*academic discipline*) (Zastrow, 2004:5). Sebagai institusi kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin akademik, kesejahteraan sosial mengacu pada suatu studi terhadap lembaga, program maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fungsi kesejahteraan sosial sebagai disiplin adalah untuk pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja sosial. Dalam konteks yang kedua inilah istilah kesejahteraan sosial sering dipertukarkan dengan pekerjaan sosial. Beberapa lembaga pendidikan menggunakan istilah pekerjaan sosial, meskipun merujuk pada satu maksud yang sama.

Namun demikian, istilah kesejahteraan sosial tidak selalu identik dengan pekerjaan sosial, khususnya di Indonesia. Lebih sering, istilah kesejahteraan sosial dipahami sebagai sebuah kondisi sehingga istilah tersebut dipakai oleh siapa saja dan dalam bidang apa saja. Oleh karena itu, jika ada istilah kesejahteraan sosial dipakai dalam konteks tertentu maka hal itu tidak selalu merujuk kepada kesejahteraan sosial sebagai disiplin keilmuan. Artinya konteks pembicaraan disini harus dibedakan antara kesejahteraan sosial sebagai kondisi dan kesejahteraan sosial sebagai disiplin keilmuan. Karena keduanya memang berbeda sekalipun dalam konteks tertentu kesejahteraan sosial juga dimaksudkan sebagai pekerjaan sosial itu sendiri.

commit to user

4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

a. Pengertian

KUBE adalah Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) yang diluncurkan Pemerintah RI sejak tahun 1990. KUBE ini dibentuk dengan harapan agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Indonesia dapat tereliminir sedikit demi sedikit.

KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup Keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulasi dan pendampingan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Program KUBE ini menjadi *trademark*-nya Departemen Sosial. Dengan metode Kelompok Usaha Bersama, ada dua unsur yang bisa dicapai oleh masyarakat yaitu keuntungan ekonomis dan sekaligus keuntungan sosial. Ini menjadi program yang sangat menarik, pertama karena dengan KUBE ini ada perguliran hasil usaha dan kedua terjadi interaksi sosial, kesetiakawanan sosial diantara anggota kelompok KUBE maupun lingkungan sosialnya.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui :

commit to user

- a) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- b) Peningkatan pendapatan.
- c) Pengembangan usaha.
- d) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

Sasaran PROKESOS dalam kaitan dengan kebijakan MPMK adalah PMKS yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Keluarga Fakir Miskin yang dibina melalui Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir miskin.
- 2) Kelompok Masyarakat Terasing yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing.
- 3) Para Penyandang Cacat yang dibina melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- 4) Lanjut Usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- 5) Anak Terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar.
- 6) Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dibina melalui Program Peningkatan Peranan Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- 7) Keluarga Muda Mandiri yang dibina melalui Program Pembinaan Keluarga Muda Mandiri.
- 8) Remaja dan Pemuda yang dibina melalui Program Pembinaan Karang Taruna.
- 9) Keluarga Miskin di Daerah Kumuh yang dibina melalui Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

commit to user

3. Proses Pembentukan KUBE

Pokok pembentukan KUBE untuk sasaran PMKS lainnya adalah:

- a) Pelatihan ketrampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan ketrampilan PMKS serta kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan basil usahanya. Nilai tambah lain dari pelatihan adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri PMKS untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya.
- b) Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat. Bantuan ini merupakan hibah (bukan pinjaman atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada warga masyarakat lain yang perlu dibantu.
- c) Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan berkembangnya KUBE, mengingat sebagian besar PMKS merupakan kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. Secara fungsional pendampingan dilaksanakan oleh PSK yang dibantu oleh infrastruktur kesejahteraan sosial di daerah seperti Karang Taruna (KT), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Panitia Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial (WPUKS).

4. Organisasi dan Manajemen

a. Kepengurusan KUBE

- 1) Pada hakekatnya KUBE dibentuk dari, oleh dan untuk anggota kelompok.
- 2) Pengurus KUBE dipilih dari anggota kelompok yang mau dan mampu mendukung pengembangan KUBE, memiliki kualitas seperti kesediaan mengabdikan, rasa keterpanggilan, mampu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, mempunyai keuletan, pengetahuan

dan pengalaman yang cukup serta yang penting adalah merupakan hasil pilihan dari anggotanya.

b. Keanggotaan KUBE

- 1) Anggota KUBE adalah PMKS sebagai sasaran program yang telah disiapkan. Jumlah anggota untuk setiap KUBE berkisar antara 5 sampai 10 orang / KK sesuai dengan jenis PMKS.
- 2) Khusus untuk Pembinaan Masyarakat Terasing dan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh pembentukan KUBE berdasarkan unit pemukiman sosial, artinya suatu unit pemukiman sosial adalah satu KUBE.

c. Administrasi KUBE

- 1) Untuk dapat berjalan dan berkembangnya KUBE dengan baik, maka pengurus maupun pengelola KUBE perlu memiliki catatan atau administrasi yang baik, yang mengatur keanggotaan, organisasi, kegiatan, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya.
- 2) Catatan dan administrasi KUBE meliputi antara lain buku anggota, buku peraturan KUBE, pembukuan keuangan/ pengelolaan hasil, daftar pengurus dan sebagainya.

d. Pembinaan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

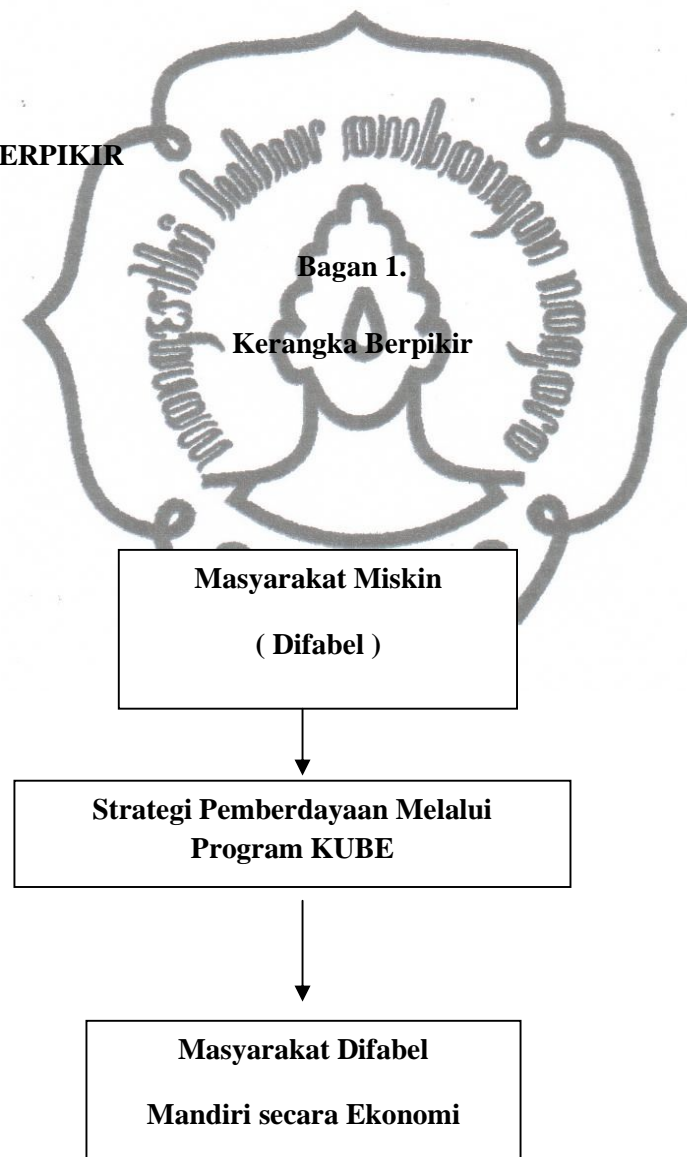
- 1) Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penumbuhan dan pengembangan KUBE, disamping meningkatkan motivasi dan kemampuan pelaksanaan dilapangan serta kapasitas manajemen pengelola KUBE. Pembinaan dilaksanakan oleh petugas sosial wilayah mulai dan tingkat propinsi, kabupaten / kodya, kecamatan dan desa/ kelurahan secara berjenjang.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan KUBE dan permasalahan yang merupakan hambatan serta upaya pemecahannya, *commit to user*

sehingga upaya penumbuhan dan pengembangan KUBE berjalan sesuai dengan rencana.

- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi beserta pelaporannya dilaksanakan melalui mekanisme secara berjenjang mulai dan tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kodya, propinsi dan pusat dalam koordinasi Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) PROKESRA secara berjenjang.

(Sumber: <http://thor.prohosting.com/~arema/malang/prokesos/pedoman.htm>)

C. KERANGKA BERPIKIR



Masyarakat miskin difabel tentunya menginginkan kemandirian ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan hidupnya. Kurangnya pengetahuan dalam mengelola *commit to user*

keuangan, kurangnya keterampilan dan bekerja, tingkat pendidikan yang rendah, serta kemacetan usaha adalah faktor yang membuat mereka kesulitan untuk mewujudkan keinginan mereka yaitu kemandirian ekonomi supaya dapat mensejahterakan kehidupan keluarga. Adanya faktor tersebut maka masyarakat miskin difabel diberi wadah dan diberdayakan supaya mereka dapat mengembangkan dirinya, menambah pengetahuan dalam mengelola usaha.

KUBE merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan keluarga miskin difabel, guna meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui kegiatan ekonomi produktif dan pembentukan lembaga keuangan mikro. Program itu dilakukan dengan pemberian modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi usaha dan pendampingan.

Dengan KUBE si miskin ditargetkan dapat mandiri, yang ditunjukkan dengan indikator yaitu telah memiliki kegiatan ekonomi produktif yang bisa dikembangkan, dan memudahkan mereka untuk berpindah menjadi sektor usaha kecil, sehingga mampu mengurangi kemiskinan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dia jadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang di teliti. (Slamet, 2006:7). Dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemberdayaan melalui program KUBE dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Difabel Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)” ini dilakukan di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Hal ini dikarenakan terdapat difabel yang membentuk KUBE sehingga penulis dapat mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Berbagai sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data Primer adalah sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun ataupun spontan baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden yaitu :

1. Informasi dari difabel yang membentuk KUBE

2. Informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam penanganan masalah difabel, seperti Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karanganyar.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder : buku literatur, majalah, arsip, koran, gambar, dokumentasi hasil penelitian yang sesuai dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila : 1. Sesuai dengan tujuan; 2. Direncanakan dan dicatat secara sistematis; 3. Dapat di kontrol keandalannya (reabilitasnya) dan validitasnya (Susanto, 2006:126).

Observasi ini dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapat sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan masalah dengan penelitian.

Observasi yang penulis lakukan disini menyangkut serta aktivitas difabel yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

b) Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara dengan cara melakukan percakapan terhadap informan atau orang yang diwawancarai. Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan

yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, bentuk keterlibatan, persepsi dan memproyeksikan hal-hal yang dikaitkan dengan harapan di masa mendatang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan-pencatatan atau pengutipan dan pengambilan gambar-gambar dari dokumen yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini juga berfungsi untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, khususnya sebagai teknik pengumpulan data.

5. Teknik Pengambilan Sampel

a) Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu difabel yang terkena program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

b) Populasi

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah difabel yang menjadi anggota KUBE yang berada di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian kualitatif sampel bukan mewakili populasi, sehingga tidak ditentukan berdasarkan ketentuan yang mutlak, tetapi sampel berfungsi untuk menggali beragam informasi yang penting yang dibutuhkan peneliti di lapangan.

c) Sampling

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel harus dipandang sebagai perkiraan dari keseluruhan dan bukan keseluruhan itu sendiri. Tentang siapa dan berapa jumlah sampel sangat tergantung dari informasi yang diperlukan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maximum variation sampling* (sampel variasi maksimum). Strategi pengambilan sampel variasi maksimum dimaksudkan untuk dapat menangkap atau menggambarkan suatu tema sentral dari studi melalui informasi yang saling menyilang dari berbagai tipe responden. Peneliti mengambil sejumlah responden tertentu untuk melihat variasi dari pengaruh suatu program. Logika dari pengambilan sampel variasi maksimum adalah pola-pola umum yang muncul dari variasi-variasi yang besar menjadi perhatian khusus dan bersifat di dalam suatu penelitian. Peneliti memilih strategi pengambilan sampel variasi maksimum, bukan bermaksud untuk menggeneralisasikan penemuannya, melainkan mencari informasi yang dapat menjelaskan adanya variasi serta pola-pola umum yang bermakna dalam variasi tersebut. (Slamet, 2006:65-66)

Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Pengurus Kelompok Usaha Bersama yang memahami latar belakang perkembangan Kelompok Usaha Bersama. Dipilih 3 orang pengurus Kelompok Usaha Bersama yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Kriteria pengambilan sampel untuk pengurus KUBE sebagai berikut :

- 1) Terlibat aktif dalam kegiatan KUBE
- 2) Menguasai informasi mengenai KUBE

- b. Anggota Kelompok Usaha Bersama yang menjadi pemanfaat aktif dalam Kelompok Usaha Bersama. Pada penelitian ini dipilih 5 laki-laki dan 5 perempuan anggota kelompok usaha bersama yang akan diwawancarai.

Kriteria pengambilan sampel untuk anggota KUBE sebagai berikut :

- 1) Menjadi anggota yang terlibat aktif di setiap pertemuan rutin kelompok
- 2) Anggota yang menjadi pemanfaat KUBE baik di bidang sosial maupun secara ekonomi

- c. Pemerintah Lokal Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Pada penelitian ini, akan diwakili Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Pada penelitian ini, akan diwakili Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

- e. Suami dan Istri atau keluarga dari anggota maupun pengurus Kelompok Usaha Bersama untuk mengetahui dampak dari Program Kelompok Usaha Bersama.

6. Validitas Data

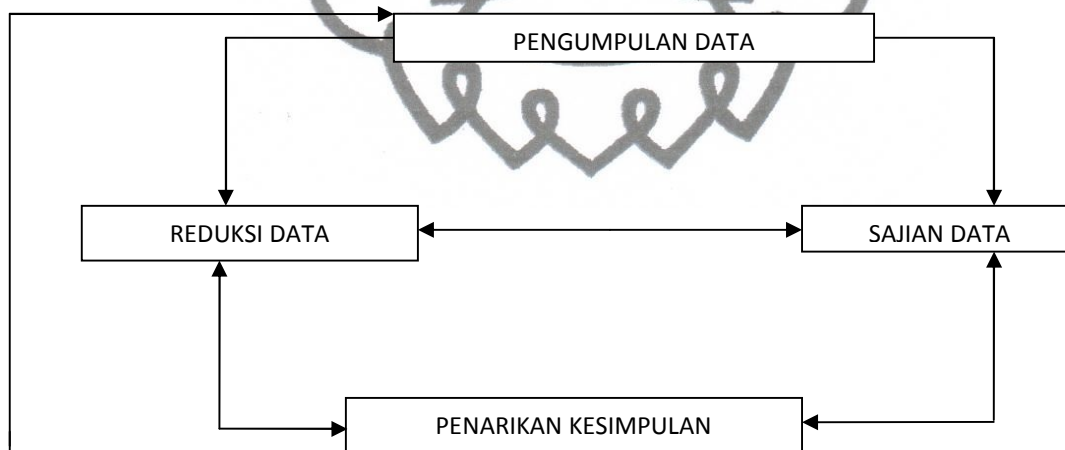
Dalam menentukan validitas data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian (Moloeng, 2004:330).

Denzin (dalam Moloeng, 2004) membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. *commit to user*

Dalam penelitian ini digunakan validitas data dengan menggunakan triangulasi dengan sumber, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda melalui *indepth interview*, yaitu anggota Kelompok Usaha bersama, Pengurus Kelompok Usaha Bersama, keluarga dari anggota maupun pengurus Kelompok Usaha Bersama sebagai pemanfaat tidak langsung serta mitra Kelompok Usaha Bersama (pemerintah lokal dan pemerintah Daerah).

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan model analisis interaktif (*Interactive Model Analysis*). Menurut H.B Sutopo bahwa dalam proses analisa data ada tiga komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap peneliti. Tiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sutopo, 2002:91-93).



Keterangan :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua pihak baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan dan informasi yang dibutuhkan. Adapun data primer ini akan diperoleh dari

beberapa sumber yang menjadi key person dalam pengumpulan data yaitu : difabel anggota KUBE, Pengurus KUBE, pihak-pihak yang terkait dengan KUBE, Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar serta keluarga dari difabel anggota dan pengurus KUBE. Selain data primer yang dikumpulkan juga data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel. Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah :

- 1) Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan sumber dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti : dokumen-dokumen maupun arsip-arsip di KUBE, arsip-arsip di KUBE, arsip-arsip dari Desa dan Kecamatan Tasikmadu sebagai pendukung data dan informasi yang dibutuhkan.
- 2) Kepustakaan adalah data dan informasi diperoleh dari mempelajari buku-buku, literatur, Koran maupun jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada di dalam *field note* (catatan lapangan). Proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam yaitu difabel anggota KUBE, pengurus KUBE, pihak-pihak yang terkait dengan KUBE, pihak-pihak yang terkait dengan KUBE, Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar serta keluarga dari difabel anggota dan pengurus KUBE. Artinya menggunakan temuan-temuan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dan membuang bagian-bagian yang tidak mendukung penelitian ini. Kemudian data-data dari beberapa sumber di *crosscheck*-kan dengan temuan dari hasil wawancara sumber lain untuk memperkuat data.

c. Sajian Data

Dari temuan-temuan hasil penelitian dengan berbagai metode yaitu wawancara, observasi dan kepustakaan dan berbagai sumber informasi yaitu difabel anggota KUBE,

Pengurus KUBE, pihak-pihak yang terkait dengan KUBE, Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar serta keluarga dari difabel anggota dan pengurus KUBE dilakukan penyajian data hasil penelitian. Pada bagian ini data yang disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan ada gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar semua data yang dikumpulkan dapat dipahami secara mendalam kemudian disusun secara sistematis.

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Setelah pengumpulan data sudah berakhir, maka dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada hasil temuan yang didapat dalam reduksi data dan sajian data.

B. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Keadaan Geografi

a. Letak dan Batas Wilayah

Desa Suruh merupakan salah satu bagian dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Tasikmadu. Desa Suruh beriklim tropis. Suhu udara rata-rata 24-32 C. Jarak wilayah Desa Suruh dengan pusat pemerintahan Kecamatan Tasikmadu sejauh 1 Km dan jarak wilayah Desa Suruh dengan pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar sejauh 2,5 Km.

Batas wilayah Kecamatan Tasikmadu :

1. Batas sebelah Utara : Desa Wonolopo
2. Batas sebelah Selatan : Desa Ngijo
3. Batas sebelah Barat : Desa Pandeyan
4. Batas sebelah Timur : Desa Gaum

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Suruh adalah 274.8410 Ha, yang terdiri atas 7 Rukun Warga (RW) dan 39 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan di dalam wilayah ini terdapat 7 Dusun yang meliputi :

- a. Dusun Pendem Kulon
- b. Dusun Ngemplak
- c. Dusun Jetis
- d. Dusun Grogol
- e. Dusun Pendem Wetan
- f. Dusun Pakis
- g. Dusun Dagen

2. Keadaan Monografi**a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Suruh 6.773 jiwa, terbagi atas 1744 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk tersebut terbagi atas 3.442 penduduk laki-laki dan 3.331 penduduk perempuan.

b. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Secara garis besar komposisi penduduk menurut umur dapat dikelompokkan dalam 3 kategori :

- a. Usia muda/ angkatan kerja belum produktif, yaitu usia 0-14 tahun.
- b. Usia dewasa/ angkatan kerja produktif, yaitu 15-5 tahun
- c. Usia tua/ angkatan kerja tidak produktif, yaitu usia 60 tahun keatas.

Keadaan penduduk wilayah Desa Suruh menurut komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Penduduk Dalam Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kel. Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0-4	265	268	533
2	5-9	302	296	598
3	10-14	255	267	522
4	15-19	289	272	561
5	20-24	277	258	535
6	25-29	297	271	568
7	30-34	296	296	592
8	35-39	252	238	490
9	40-44	261	236	497
10	45-49	212	230	442
11	50-54	214	213	427
12	55-59	258	210	468
13	60 >	266	276	542
	JUMLAH	3.442	3.331	6.773

Sumber : Monografi Desa Suruh 2010

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa kategori penduduk usia belum produktif adalah 1.653 jiwa dan kategori usia tidak produktif sebesar 542 jiwa. Sedangkan usia produktif yang merupakan jumlah terbesar adalah 4.578 jiwa. Jadi dapat dinyatakan bahwa sebagian besar penduduk Desa Suruh termasuk dalam angkatan kerja produktif dan kondisi ini akan sangat berpengaruh dalam perkembangan wilayah itu sendiri.

c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses dimana seorang individu dapat memahami dan memberikan makna dalam kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk di Desa Suruh, dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
(Bagi Umur 5 tahun keatas)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	179
2	Tamat SLTA	1517
3	Tamat SMP	1162
4	Tamat SD	1140
5	Tidak Tamat SD	165
6	Belum Tamat SD	535
7	Tidak Sekolah	391
	JUMLAH TOTAL	5089

Sumber : Monografi Desa Suruh 2010

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk Desa Suruh masih dalam tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan rendah ini dihitung dari jumlah keseluruhan penduduk yang tamat SD sampai dengan tidak sekolah sebesar 1531 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang termasuk dalam tingkat pendidikan menengah

yaitu tamat SMP sampai dengan tamat SMA sebanyak 2.679 jiwa dan tamat Akademi/ Perguruan Tinggi 179 jiwa.

d. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Suruh terbagi dalam berbagai pekerjaan seperti petani, pengusaha, pegawai negeri, pengangkutan, pedagang maupun buruh. Untuk memperjelas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Penduduk Menurut Mata Pencaharian
(Bagi Umur 10 tahun keatas)

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri (Sipil/ ABRI)	144
2	Swasta	950
3	Pedagang	105
4	Petani	310
5	Pertukangan	90
6	Buruh Tani	430
7	Pensiunan	180
8	Angkutan	8
9	Jasa	60
10	Lain-lain	-

Sumber : Monografi Desa/ Kelurahan Suruh 2010

Dari data diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Suruh yang paling banyak adalah swasta yaitu 950 jiwa. Golongan swasta ini adalah mereka yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta.

e. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan hal paling pokok dan mendasar serta menjadi hak asasi yang paling hakiki bagi manusia. Agama dijadikan pedoman moral dan tingkah laku dalam kehidupan manusia. Perbedaan agama yang menimbulkan keserasian dalam masyarakat adalah selalu yang diharapkan setiap anggota-anggotanya. Di Desa Suruh, jumlah dari masing-masing pemeluk agama dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6550
2	Kristen	81
3	Katholik	34
4	Hindu	-
5	Budha	-
	JUMLAH TOTAL	6665

Sumber : Monografi Desa/ Kelurahan Suruh 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas agama penduduk Desa Suruh adalah agama Islam berjumlah 6550 jiwa, Kristen berjumlah 81 jiwa, Katholik 34 jiwa, sedangkan penduduk di Desa Suruh tidak ada yang memeluk agama Hindu dan Budha.

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada suatu daerah mempengaruhi perkembangan daerah tersebut, jika suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang lebih kompleks dan memadai, maka perkembangan daerah tersebut akan lebih cepat dibandingkan daerah yang sarana dan prasarananya tidak kompleks dan tidak memadai.

Sarana dan prasarana di Desa Suruh terdiri dari :

a. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang terdapat di Desa Suruh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5
Sarana Komunikasi

No	Sarana Komunikasi	Jumlah
1	Kantor Telkom	-
2	Kantor Pos	-
3	Kantor Pos Pembantu	-
4	Pemancar Radio	-
5	Pemancar Telepon Seluler	-
6	Stasiun Relley TV	-
7	Wartel	5
8	Warnet	-

Sumber : Monografi Desa/ Kelurahan Suruh 2010

Sarana komunikasi sangat penting bagi manusia. Dengan sarana komunikasi, manusia dapat menyampaikan dan menerima informasi dengan cepat agar mereka tidak akan ketinggalan informasi.

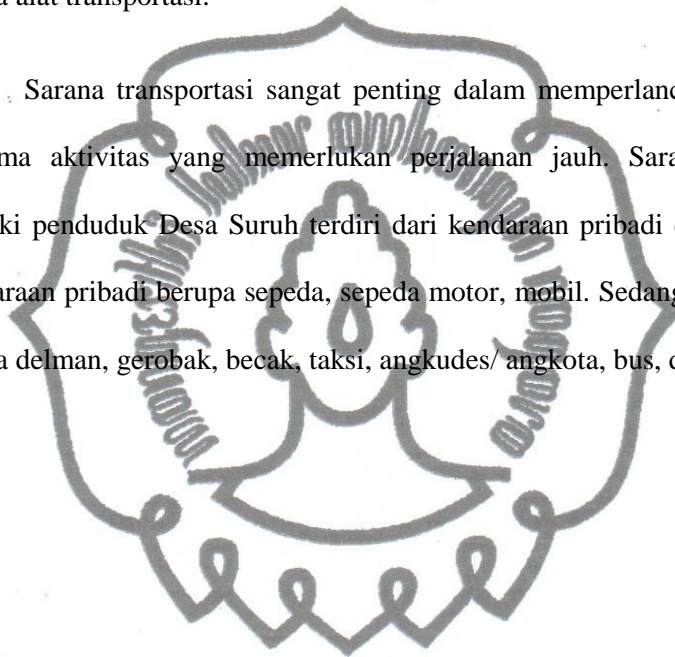
commit to user

Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa sarana komunikasi yang ada hanya wartel dengan jumlah 5 buah dan yang merupakan sarana satu-satunya yang digunakan penduduk Desa Suruh.

b. Sarana Transportasi

Kemajuan perekonomian di Desa Suruh tentu saja didukung oleh sarana dan prasarananya. Prasarana yang ada di daerah ini terutama alat perhubungan yang berupa alat transportasi.

Sarana transportasi sangat penting dalam memperlancar aktifitas penduduk terutama aktivitas yang memerlukan perjalanan jauh. Sarana transportasi yang dimiliki penduduk Desa Suruh terdiri dari kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi berupa sepeda, sepeda motor, mobil. Sedangkan kendaraan umum berupa delman, gerobak, becak, taksi, angkudes/ angkota, bus, dan truk.



Tabel 6
Sarana Transportasi

No	Sarana Transportasi	Jumlah
1	Sepeda	1975
2	Dokar/ Delman	-
3	Gerobak	1
4	Kendaraan beroda tiga	-
5	Becak	11
6	Sepeda Motor	2085
7	Taksi	-
8	Angkudes/ Angkota	8
9	Mobil Pribadi	225
10	Bus Kota	-
11	Bus Umum	-
12	Truk	10
13	Lain-lain/ Ojek	-
	JUMLAH	2328

Sumber : Monografi Desa/ Kelurahan Suruh 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sepeda motor merupakan sarana transportasi paling banyak yang dimiliki penduduk Desa Suruh, yakni 2085 buah, sedangkan sarana transportasi yang paling sedikit dimiliki penduduk Desa Suruh adalah gerobak, yaitu ada 1 buah.

3. Profil Difabel

Sesuai dengan *unit of analysis* (satuan kegiatan) dalam penelitian ini maka profil difabel disajikan dalam tabel-tabel berikut ini, yaitu :

- a. Difabel menurut jenis kecacatan dan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar tahun 2008.

Tabel 7

**Difabel menurut jenis kecacatan dan Kecamatan
di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008**

No	Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu Wicara	Cacat mental	Ganda	Jumlah
1	Karanganyar	80	50	69	36	16	251
2	Colomadu	76	35	25	20	5	161
3	Matesih	109	45	35	54	7	250
4	Ngargoyoso	103	27	19	4	6	159
5	Tasikmadu	62	37	31	19	3	152
6	Jaten	33	25	31	15	4	108
7	Gondangrejo	39	54	21	6	7	127
8	Kebak Kramat	136	58	50	19	20	291
9	Mojogedang	50	60	64	46	28	248
10	Karangpandan	69	28	37	26	6	167
11	Kerjo	62	45	51	17	20	195
12	Jenawi	63	29	32	125	1	250
13	Jumantono	102	75	27	0	27	231
14	Jumapolo	57	19	27	3	7	113
15	Jatipuro	67	24	21	9	4	125
16	Jatiyoso	49	23	28	17	11	128
17	Tawangmangu	53	8	18	11	7	97
	Jumlah	1210	631	586	314	187	2928

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2008

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa difabel menurut jenis kecacatannya di Kabupaten Karanganyar adalah tuna daksa dengan 1210 orang, diikuti dengan tuna netra 631 orang, tuna rungu wicara 586 orang, cacat mental 314 orang dan cacat ganda dengan 187 orang.

Jumlah difabel menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : jumlah difabel di Kecamatan Kebakkramat 291, Kecamatan Karanganyar 251 orang, Kecamatan Matesih dan Jenawi 250 orang, Kecamatan Mojogedang 248 orang, Kecamatan Jumantono 231 orang, Kecamatan Kerjo 195 orang, Kecamatan Karangpandan 167 orang, Kecamatan Colomadu 161 orang, Kecamatan Ngargoyoso 159 orang, **Kecamatan Tasikmadu 152 orang**, Kecamatan Jatiyoso 128 orang, Kecamatan Gondangrejo 127 orang, Kecamatan Jatipuro 125, Kecamatan Jumapolo 113 orang, Kecamatan Jaten 108 orang, dan Kecamatan Tawangmangu 97 orang.

Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 2009 diketahui jumlah difabel di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Difabel menurut jenis kelamin dan jenis kecacatan
Di Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Kecacatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Cacat Tubuh	947	691	1638
2	Cacat Rungu Wicara	454	330	784
3	Cacat Netra	404	361	765
4	Cacat Mental	325	308	633
5	Cacat Mental eks.psikotik	206	202	408
6	Cacat Ganda	145	121	266
7	Bibir Sumbing	108	103	211
	Jumlah	3900	2116	6016

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa difabel menurut jenis kecacatan dan jenis kelamin di Kabupaten Karanganyar adalah cacat tubuh sebanyak 1638 orang yang terdiri dari 947 laki-laki dan 691 perempuan, cacat rungu wicara sebanyak 784 orang yang terdiri dari 454 laki-laki dan 330 perempuan, cacat netra sebanyak 765 yang terdiri dari 404 laki-laki dan 361 perempuan, cacat mental sebanyak 633 orang yang terdiri dari 325 laki-laki dan 308 perempuan, cacat mental eks.psikotik sebanyak 408 yang tersiri dari 206 laki-laki dan 202 perempuan, cacat ganda sebanyak 266 yang terdiri dari 145 laki-laki dan 121 perempuan, dan bibir sumbing sebanyak 211 yang terdiri dari 108 laki-laki dan 103 perempuan.

b. Banyaknya penyandang Kecacatan di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2010

Berdasarkan data dari Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar 2010 diketahui jumlah difabel di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Banyaknya penyandang Kecacatan
Di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2009

No	Desa	Tuna Netra	Tuna Rungu/ Wicara	Tuna Grahita/ Mental	Tuna Daksa	Tuna Ganda
1	Buran	2	3	1	6	-
2	Papahan	2	6	5	-	-
3	Ngijo	2	3	6	6	-
4	Gaum	2	2	3	-	-
5	Suruh	6	2	1	15	-
6	Pandeyan	3	6	4	6	-
7	Karangmojo	2	5	2	14	-
8	Kaling	6	9	11	1	-
9	Wonolopo	4	4	-	-	-
10	Kalijirak	4	8	6	-	-
	Jumlah	33	48	39	48	-

Sumber : Kecamatan. Tasikmadu Dalam Angka 2010

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa difabel menurut jenis kecacatannya adalah cacat tubuh dengan 48 orang, diikuti dengan cacat mental 39 orang, tuna rungu wicara 39 orang, tuna netra 33 orang dan cacat ganda tidak ada.

Jumlah difabel menurut Desa di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : jumlah difabel di Desa Kebak Kramat 314 orang, Kecamatan Mojogedang 246 orang, Kecamatan Gondangrejo 188 orang, Kecamatan Jumapolo 106 orang, Kecamatan Karangpandan 180, Kecamatan Matesih 160 orang, Kecamatan Karanganyar 153, Kecamatan Kerjo 148 orang, **Kecamatan Tasikmadu 132 orang**, Kecamatan Jatipuro 131 orang, Kecamatan Jatiyoso 129 orang, Kecamatan Jaten 117 orang, Kecamatan 109 orang, Kecamatan Jumapolo 106 orang, Kecamatan Jenawi 85 orang, Kecamatan Ngargoyoso 79 orang, dan Kecamatan Tawangmangu 25 orang.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa difabel di Kecamatan Tasikmadu adalah cacat tubuh dan cacat rungu wicara, yakni 48 orang, diikuti dengan cacat mental 39 orang dan cacat netra 33 orang.

c. Difabel menurut jenis kelamin dan kecacatan di Desa Suruh tahun 2010

Berdasarkan data dari Monografi Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar 2010 diketahui jumlah difabel di Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 10

**Difabel menurut jenis kelamin dan kecacatan
Di Desa Suruh tahun 2010**

No	Jenis Kecacatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Cacat Tubuh	12	12	24
2	Cacat Rungu Wicara	2	3	5
3	Cacat Netra	5	1	6
4	Cacat Mental	9	4	13
5	Cacat Ganda	1	-	1
	Jumlah	29	20	49

Sumber : Monografi Desa Suruh 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah difabel di Desa Suruh yaitu 49 orang dan berdasarkan jenis kecacatannya, maka jumlah terbanyak adalah cacat tubuh yaitu 24 orang, cacat mental 13 orang, cacat netra 6 orang, cacat rungu wicara 5 orang dan cacat ganda 1 orang.

4. Gambaran Umum Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

a. Sejarah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Di Desa Suruh terdapat 2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yakni KUBE Sumber Rejeki dan Mekar Jaya. KUBE adalah Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) yang diluncurkan Pemerintah RI sejak tahun 1990. KUBE ini dibentuk dengan harapan agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Indonesia dapat tereliminir sedikit demi sedikit.

KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses Program Kesejahteraan Sosial . KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial yang mencakup Keseluruhan proses. Pembentukan

KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulasi dan pendampingan.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Program KUBE ini menjadi trademark-nya Departemen Sosial. Dengan metode Kelompok Usaha Bersama, ada dua unsur yang bisa dicapai oleh masyarakat yaitu keuntungan ekonomis dan sekaligus keuntungan sosial. Ini menjadi program yang sangat menarik, pertama karena dengan KUBE ini ada perguliran hasil usaha dan kedua terjadi interaksi sosial, kesetiakawanan sosial diantara anggota kelompok KUBE maupun lingkungan sosialnya.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui :

- e) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- f) Peningkatan pendapatan.
- g) Pengembangan usaha.
- h) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

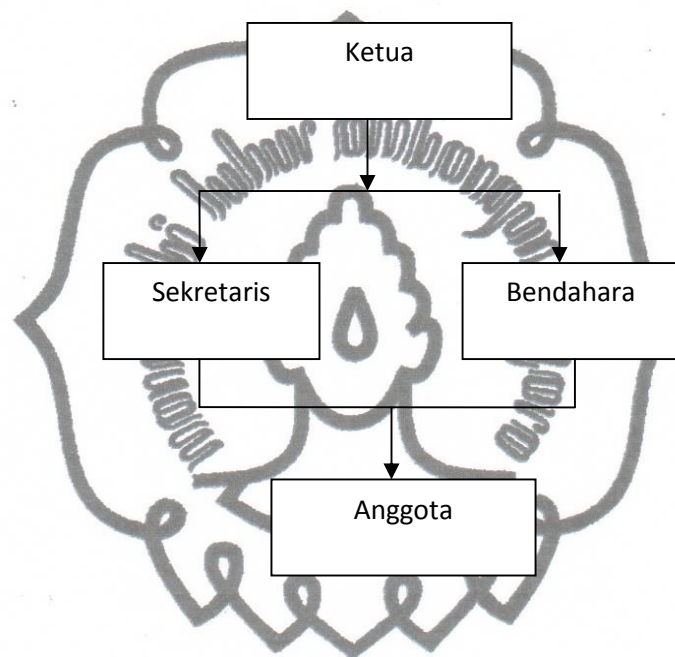
c. Struktur Organisasi

Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, terdapat 2 Kelompok Usaha Bersama (KUBE); masing-masing KUBE terdiri dari 5 orang yang berdomisili di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Dimana satu desa terdiri dari 5 pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota). Pengurus dan anggota KUBE di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar semuanya difabel dan sebagian besar adalah tuna daksa.

Bagan 1.

Struktur Organisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. SPRY

SPRY adalah seorang laki-laki yang berusia 51 tahun. Bapak SPRY ini adalah seorang tuna netra dengan jenis kecacatan yakni salah satu mata kirinya tidak dapat melihat dan salah satu jari ditangannya mengecil. Beliau tidak memerlukan alat bantu karena mata kanannya masih dapat dipergunakan untuk melihat. Bapak SPRY adalah ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Saat ini beliau bekerja sebagai tukang pijat dirumahnya di Dukuh Tragan RT 01 RW 08, Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

b. SD

SD usianya 41 tahun. Bapak ini seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan yaitu salah satu tangannya diamputasi. Bapak SD ini seorang lulusan SMP. Beliau mempunyai usaha dengan membuka toko kelontong dirumahnya dengan alamat Dukuh Gedangan RT 02 RW 07, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

c. SPJ

Bapak ini berusia 41 tahun, yang bertempat tinggal di Dukuh Krusuk, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Bapak ini seorang

lulusan SD. Beliau seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu kakinya diamputasi, tetapi beliau tidak memerlukan bantuan orang lain untuk berjalan. Bapak ini sekarang bekerja sebagai tukang reparasi elektro dirumahnya.

d. SGRT

Bapak SGRT adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu kakinya layu dan jari tangannya tidak lengkap. Bapak SGRT berusia 43 tahun, seorang lulusan SMP yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban dirumahnya yang beralamat di Pondok 04RT 02 RW, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

e. STD

Sutadi usianya 44 tahun. Bapak STD seorang lulusan SMP. Beliau adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu kaki layu sehingga Bapak STD selalu menggunakan kruk ketika hendak berjalan. Saat ini beliau masih membuka bengkel sepeda motor di rumahnya yang beralamat di Ngentak, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.

f. HRT

Ibu ini berusia 44 tahun. Ibu HRT adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan kedua kakinya polio. Ibu HRT seorang lulusan SMP. Saat ini ibu HRT membuka usaha menjahit dirumahnya yang beralamat di Dukuh Suruh, Desa Suruh Penden Kulon RT 01 RW 01, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

g. STRM

Ibu ini berusia 40 tahun. Ibu STRM adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu kakinya layu. Ibu ini seorang lulusan SD. Saat ini

ibu STRM bekerja sebagai penjahit di rumahnya yang beralamat di Desa Kaling RT 05 RW 01, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

h. PRJM

Ibu ini berusia 70 tahun. Ibu PRJM adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu kakinya diamputasi sehingga beliau harus menggunakan alat bantu seperti kruk ketiak ketika hendak berjalan. Ibu PRJM tidak sekolah sebelumnya. Saat ini ibu PRJM membuka warung kelontong di rumahnya yang beralamat di Dukuh Nglana Wetan, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

i. KMYM

Ibu ini berusia 50 tahun. Ibu KMYM adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu kakinya diamputasi dan salah satu mata kirinya tidak dapat melihat. Ibu ini seorang lulusan SD. Saat ini ibu KMYM tidak bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Ibu ini tinggal di Dukuh Ngijo Kulon, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

j. SGNM

Ibu ini berusia 45 tahun. Ibu SGNM adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu tangan kanannya diamputasi dan jari-jarinya tidak lengkap. Ibu ini seorang lulusan SMA. Saat ini ibu SGNM bekerja sebagai penjahit di rumahnya yang beralamat di Dukuh Ngijo Ngijo Tengah, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan deskripsi responden di atas, maka berikut ini adalah matriks karakteristik responden :

Matriks 1**Karakteristik Responden**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat	Pekerjaan	Jenis Kecacatan
1	SPRY	Laki-laki	51	Dukuh Tragan, Desa Macanan, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.	Tukang Pijit	Tuna Netra
2	SD	Laki-laki	43	Gedangan, Kaliwuluh, Kebakkramat, Karanganyar.	Toko Kelontong	Tuna Daksa
3	SPJ	Laki-laki	41	Dukuh Krusuk, Desa Kroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.	Reparasi elektro	Tuna Daksa
4	SGRT	Laki-laki	43	Pondok, desa Gaum, kecamatan Tasikmadu.	Tambal Ban	Tuna Daksa
5	STD	Laki-laki	44	Ngentak, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.	Bengkel Motor	Tuna Daksa
6	HRT	Perempuan	44	Dukuh Suruh, Desa Pendem Kulon, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.	Menjahit	Tuna Daksa

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

2. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sriyadi

Bapak Sriyadi adalah Kepala seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Bagian Pemberdayaan Difabel. Bapak ini sudah 5 tahun menjabat sebagai

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bagian Pemberdayaan Difabel. Bapak Sriyadi berusia 47 tahun ini berhasil menuntaskan kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bapak ini sekarang tinggal bersama keluarganya di Kadipiro Surakarta.

b. Sadino

Bapak Sadino adalah Staff Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinsosnakertrans dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pendamping KUBE di Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar. Bapak ini berusia 53 tahun dan berhasil menamatkan S1 di Sekolah Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saat ini beliau tinggal di Cangakan Kabupaten Karanganyar.

c. Mardiyanto

Bapak Mardiyanto adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tasikmadu berusia 45 tahun. Bapak Mardiyanto berhasil menamatkan S1 di salah satu Sekolah Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saat ini Beliau tinggal bersama keluarganya di Papahan Kecamatan Tasikmadu.

d. Sadimin

Bapak Sadimin adalah Kepala Desa Suruh berusia 42 tahun, Bapak Sadimin berhasil menamatkan S1 di salah satu Perguruan Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

e. Ngadino

Bapak Ngadino adalah Ketua KUBE Sumber Rejeki. Beliau ini adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu tangan kirinya di amputasi. Bapak Ngadino membuka usaha bengkel di rumahnya yang beralamat di Desa Suruh RT 05/ 01, Kelurahan Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. *commit to user*

f. Samini

Ibu Samini adalah seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjahit di rumahnya. Beliau berusia 33 tahun. Ibu samini hanya lulusan SD negeri di Karanganyar dan saat ini tinggal bersama suaminya di Karanganyar. Suaminya adalah seorang tuna daksa dengan jenis kecacatan salah satu kakinya layu sehingga suaminya selalu bergantung pada kursi roda.

g. Wijiati

Ibu Wijiati adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Suaminya seorang tuna daksa (kaki pincang), tetapi tidak tergantung pada orang lain. Ibu ini berusai 47 tahun, Saat ini beliau dan suaminya tinggal di Dukuh Kebon Agung RT 05 RW 06, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan deskripsi informan di atas, maka berikut ini adalah matriks karakteristik informan :

Matriks 2
Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Sriyadi	Laki-laki	47	Kepala Seksi Repesos
2	Sadino	Laki-laki	53	Pendamping Program pemberdayaan Difabel Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
3	Mardiyanto	Laki-laki	45	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tasikmadu.
4	Sadimin	Laki-laki	42	Kepala Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.
5	Ngadino	Laki-laki	44	Ketua KUBE Mekar Jaya.
6	Samini	Perempuan	33	Ibu Rumah Tangga
7	Wijiyati	Perempuan	47	Ibu Rumah Tangga

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

3. Program Pemberdayaan Difabel di Kabupaten Karanganyar

Difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia akan tetapi keberadaan mereka dalam kehidupan sehari-hari masih terpinggirkan. Masyarakat cenderung membelaskasihani dari pada memberikan kesempatan pada difabel untuk bersemangat mandiri. Mereka dianggap golongan lemah, yang karena kecacatannya tidak mampu hidup mandiri sehingga perlu bergantung kepada belas kasihan orang lain. Hal ini menyebabkan mereka kurang rasa percaya diri, terisolir dan minder dari masyarakat. Terisolasinya difabel dari masyarakat umum juga disebabkan adanya sifat malu dari keluarga dengan kecacatan mereka. Padahal seperti layaknya anggota masyarakat lain, mereka ingin diakui keberadaannya, ingin diperlakukan wajar serta ingin mendapatkan kebahagiaan dan terpenuhinya kebutuhan. Dalam setiap diri manusia terdapat adanya kebutuhan sosial antara lain kebutuhan untuk diterima atau diakui dan dihormati serta untuk mengaktualisasikan diri.

Selain itu, ketenagakerjaan difabel di Indonesia sampai saat sekarang masih menghadapi berbagai permasalahan yang jauh lebih memprihatinkan dibanding dengan permasalahan tenaga kerja orang yang tidak cacat. Hal ini karena :

- a. Tingkat pendidikan difabel sebagian besar rendah, sehingga sangat sulit bersaing dipasar kerja.
- b. Difabel yang pernah dilatih keterampilan hanya sedikit, sehingga difabel membutuhkan latihan dan bimbingan kerja khusus.
- c. Akibat krisis ekonomi, difabel yang sudah bekerja selalu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akibatnya jumlah difabel yang menganggur bertambah banyak.

Hal ini seperti di ungkapkan oleh Bapak Sadimin :

“Kalau di tanya tentang masalah difabel, terkadang saya miris. Memang, saya disini untuk menangani masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya difabel. Tetapi, saya belum bisa memberdayakan mereka secara maksimal, ya itu...karena saking banyaknya permasalahan di Indonesia, kita lihat saja, seperti: masalah pendidikan, kemiskinan, korupsi dan lain sebagainya. Belum lagi masalah difabel tentang ketenagakerjaannya. Pemerintah sendiri bingung dengan semua masalah itu, dan di sisi lain para difabel selalu menginginkan suatu perubahan dan tidak hanya masalah lain yang di pikirkan, tetapi masalah mereka juga pengen di perhatikan”.

(Wawancara, 12 Desember 2010)

Sejauh ini, program-program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Dinas Sosial masih sangat sedikit. Oleh karena itu, kondisi ketenagakerjaan difabel semacam ini perlu mendapat perhatian dan peran difabel dalam pembangunan nasional untuk lebih ditingkatkan serta diberdayakan seoptimal mungkin. Difabel sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama. Hal ini mengakibatkan disharmoni sosial dan yang harus segera mendapat kepastian hukum yang sama yang di atur oleh UU baik dari pusat atau dari Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya lebih mendayagunakan difabel diperlukan sebuah program yang dapat memberikan pelatihan dan program pemberdayaan bagi difabel.

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Sadino, seperti:

“Bahwa program dari Pemerintah Daerah sendiri itu sebenarnya udah banyak, tapi kan gak semuanya berjalan lancar. Apalagi banyak difabel datang kesini dengan bawa proposal, mereka pada minta bantuan. Tetapi, saya gak bisa ngapa-ngapain, lha wong dana yang di peruntukkan untuk para difabel aja juga sedikit kok mbak... gimana gak sedikit, wong dana terbesar itu dikeluarkan untuk PNS terutama guru kok. Tapi kan untuk pemberdayaan difabel itu sendiri udah diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat, dengan memberikan pelatihan atau keterampilan yang disesuaikan dengan

minat dan bakat difabel tersebut. Kan tujuannya juga baik mbak... agar difabel atau penyandang cacat itu bisa hidup mandiri”.

(Wawancara, 11 Desember 2010)

a. Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)

1) Latar Belakang

Populasi difabel yang ada di Jawa Tengah sebanyak 246.854 orang. Masih besarnya populasi tersebut disebabkan karena berbagai faktor antara lain dampak dari bencana alam, tindak kekerasan dan kecelakaan, serta kekurangberuntungan masyarakat akan keberadaan sistem sumber pelayanan yang ada. Kondisi tersebut memunculkan gagasan untuk mengadakan kembali kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dengan cara pro-aktif mendatangi setiap daerah di Kabupaten Karanganyar khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pelaksanaan program UPSK ada 2 periode yaitu :

- a) Periode I dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember.
- b) Periode II dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sriyadi selaku Kepala Seksi Bagian Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Karanganyar, yaitu :

“Program Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) mempunyai 2 periode dalam melakukan program ini, yaitu periode I dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember dan periode II dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni. Untuk program ini, kita mempunyai data orang-orang yang mengalami kecacatan dari derajat kecacatan yang rendah hingga yang tinggi. Untuk derajat kecacatan ringan, mereka akan diberdayakan atau diberi pelatihan. Sedangkan dengan derajat kecacatan yang tinggi, mereka akan dirujuk ke RC yang ada di Solo atau Semarang.”

(Wawancara, 21 Oktober 2010)

Sistem rujukan dilaksanakan setelah melakukan searching difabel ke daerah-daerah terpencil (melalui program UPSK). Selanjutnya untuk difabel yang mempunyai serajat kecacatan rendah mereka akan langsung diberdayakan dengan diberikan pelatihan dan keterampilan. Sedangkan difabel yang mempunyai derajat kecacatan tinggi mereka akan dirujuk ke Rehabilitation Center (RC) yang ada di Surakarta.

Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) di Kabupaten Karanganyar periode Juli-Desember ini dilaksanakan di yang dihadiri oleh para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kedua Kecamatan tersebut.

Melalui kegiatan UPSK diharapkan akan dapat diketemukan secara dini dan tepat antara system kelayakan (PMKS) dengan system sumber pelayanan serta hasil akhirnya diharapkan akan terwujud proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang efektif dan efisien di Kabupaten Karanganyar.

2) Dasar

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat.

3) Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Memperluas jangkauan dan meningkatkan upaya pemberian pelayanan kesejahteraan sosial secara lebih merata serta adil kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya kepada para difabel di Kabupaten Karanganyar.

commit to user

b) Tujuan

- a. Deteksi dini, konsultasi, rekomendasi dan solusi permasalahan serta penyebaran informasi mengenai PMKS maupun system sumber pelayanan sosial yang adapat diakses.
- b. Mendorong dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar mau berperan aktif dalam penanganan PMKS dan difabel di Kabupaten Karanganyar.

4) Sasaran

- a) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para difabel di Kabupaten Karanganyar yang belum terentaskan permasalahannya.
- b) Pihak keluarga dari PMKS atau difabel.
- c) Masyarakat lingkungan tempat tinggal PMKS atau difabel.
- d) Dunia Usaha.

b. Program Rehabilitasi

Yang dimaksud program rehabilitasi yaitu program yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan difabel agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Selain itu program rehabilitasi juga diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial difabel agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sriyadi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bagian Pemberdayaan Difabel Dinsosnakertrans, bahwa :

“Dari program rehabilitasi ini, diharapkan mampu membawa difabel yang awalnya hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan dianggap sebagai kaum lemah, kini memiliki rasa percaya diri dan tidak minder. Dari program ini, diberikan suatu motivasi atau dorongan agar mereka sadar dan tahu bahwa mereka bisa hidup mandiri dan tanpa bergantung kepada orang lain.”

(Wawancara, 20 September 2010) *mit to user*

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Sadino, bahwa :

“Program rehabilitasi ini merupakan program penguatan mental difabel yang dari dasarnya mereka tidak pernah percaya akan kemampuan yang mereka miliki bahwa mereka juga bagian dari masyarakat yang memiliki kesamaan hak yang sama. Selain pemberian bimbingan penguatan mental, disini juga diberikan bimbingan sosial, agar difabel bisa bersosialisasi dan bergaul dengan masyarakat baik sesama difabel maupun masyarakat yang tidak cacat.”

(Wawancara, 20 September 2010)

Program rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, spiritual dan sosial berupa :

1. Motivasi

Program motivasi ini diberikan kepada difabel dengan tujuan untuk mengembalikan semangat dan rasa percaya diri para difabel. Meskipun mereka mempunyai kekurangan, mereka harus tetap bangkit kembali dan mau memanfaatkan kekurangan mereka sebagai kelebihan hingga akhirnya mereka dapat hidup mandiri dan tidak bergantung pada oranglain. Program motivasi diberikan kepada semua difabel, walaupun pelaksanaan teknis dari program motivasi ini tetap dilaksanakan sesuai dengan jenis kecacatan.

Bapak Sriyadi selaku Kepala Seksi Repesos bidang Pemberdayaan

Difabel Dinsosnakertrans menyatakan bahwa :

“Program motivasi ini bertujuan agar difabel dapat mempunyai motivasi untuk bangkit dan melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan oranglain. Dalam program motivasi ini berfungsi untuk pemulihan dan penguatan mental difabel. Program ini dilakukan sebelum difabel diberi pelatihan keterampilan”. (Wawancara, 22 September 2010)

Hal senada didukung oleh pernyataan Bapak Sandi yang mengatakan bahwa :

“Program motivasi ini sangat berguna bagi saya mbak... dulu saya diberi motivasi berupa dukungan dan support agar saya dan difabel yang lain tidak lagi merasa minder apabila hendak bergaul dengan masyarakat normal. Dulu saya

benar-benar gak percaya diri kalau ketemu dengan orang-orang yang normal, tapi dengan adanya program motivasi ini, saya sudah berubah dan kini tidak lagi merasa minder”. (Wawancara, 14 Desember 2010)

2. Bimbingan spiritual

Program bimbingan spiritual diberikan kepada difabel agar mereka mendapatkan keseimbangan hidup antara di dunia dan di akhirat, mereka harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang di Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Bentuk bimbingan spiritual bagi yang beragama Islam adalah pengajian atau ceramah dari ustadz, belajar membaca Al Quran bagi tuna daksa, bagi tuna netra mereka akan diajari membaca Al Quran dengan menggunakan huruf Braille yaitu tulisan arab yang berupa titik-titik seperti huruf Braille. Bagi yang beragama Kristen maupun Katolik, mereka juga ada ceramah keagamaan. Program bimbingan spiritual ini juga bisa dijadikan sebagai sarana bersosialisasi antar difabel.

Menurut Bapak Sriyadi selaku Kepala Seksi Repesos bidang Pemberdayaan Difabel Dinsosnakertrans menyatakan bahwa :

“Bimbingan Spiritual ini berfungsi untuk pemulihan dan penguatan mental difabel. Sehingga difabel mempunyai keseimbangan lahir dan batin . dari sisi lahir diberi keterampilan dan pelatihan, sedangkan dari sisi batin diberi bimbingan spiritual atau kerohanian”. (Wawancara, 22 Desember 2010)

Sementara Bapak Sandi berpendapat, bahwa :

“Dengan adanya bimbingan spiritual ini saya jadi lebih dekat dengan Tuhan mbak... karena awalnya saya tuh jarang banget mbak sholat, bahkan gak bisa baca Al Quran heheee... tapi dari sini saya sudah lumayan bisa baca Al Quran ya walaupun gak lancar sih mbak, jadi malu hehee...”

(Wawancara, 14 Desember 2010)

3. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik dilakukan dengan cara difabel dikelompokkan sesuai dengan jenis kecacatannya, selanjutnya mereka akan dilatih bagaimana menggunakan alat-alat bantu, seperti penggunaan kursi roda, kruk ketiak dan sepeda motor untuk tuna daksa. Bagi difabel yang berasal dari keluarga kurang mampu, mereka akan mendapatkan alat bantu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Alat bantu yang biasanya diberikan kepada difabel berupa kursi roda, kruk ketiak. Dengan alat bantu dan bimbingan fisik tersebut diharapkan difabel dapat melakukan aktivitasnya sendiri dengan baik dan tidak bergantung pada orang disekitarnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sadino selaku Pendamping Program Pemberdayaan Difabel :

“Disini difabel diajarkan bagaimana cara menggunakan alat bantu seperti kursi roda, kruk ketiak. Hal ini diharapkan difabel dapat melakukan aktivitasnya sendiri dengan baik dan tidak bergantung pada orang disekitarnya. Dan bagi difabel yang kurang mampu diberikan bantuan kursi roda dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar”. (Wawancara, 29 Desember 2010)

Sementara itu Ibu Suginem (difabel dengan jenis kecacatan salah satu tangan kanannya diamputasi dan jari-jarinya tidak lengkap) mengungkapkan bahwa :

“Saya senang dan bersyukur banget mbak..mbak...karena saya mendapat bantuan kursi roda. Dengan ini saya bisa kemana-mana dan tidak lagi merepotkan orang lain. Awalnya saya tidak bisa menggunakannya, tapi kan sebelumnya saya sudah diajarkan bagaimana menggunakan kursi roda, gitu mbak...” (Wawancara, 24 Desember 2010)

4. Bimbingan Sosial

Bimbingan Sosial diberikan kepada difabel dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri dalam bersosialisasi dengan masyarakat normal sekitarnya. Selain itu, bimbingan sosial juga mengajarkan bagaimana cara difabel

berkomunikasi dengan difabel lainnya baik mempunyai jenis kecacatan yang sama maupun yang berbeda. Dalam bimbingan sosial ini, difabel juga diarahkan bahwa mereka sama dengan masyarakat normal lain, sehingga mereka tidak perlu minder ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat normal.

Seperti yang di ungkapkan Bapak Sadino selaku Pendamping Program Pemberdayaan Difabel bahwa :

“Selain diberikan bimbingan-bimbingan diatas, disini difabel juga diberikan bimbingan sosial yang bertujuan mengembalikan rasa percaya diri dalam bersosialisasi dengan masyarakat normal sekitarnya”. (Wawancara, 27 Desember 2010)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugiyarto :

“Di bimbingan sosial ini, saya mendapatkan penjelasan, pengarahan akan tujuan hidup dan hidup bermasyarakat mbak... sehingga rasa percaya diri saya untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lain sudah tumbuh lagi dan tidak lagi harus malu dan minder ketika harus bergaul dengan masyarakat lainnya”. (Wawancara, 24 Desember 2010)

5. Bimbingan Lanjut

Program bimbingan lanjut diberikan khusus kepada difabel yang mempunyai derajat kecacatan yang sangat tinggi sehingga memerlukan penanganan yang serius. Sebagian besar difabel yang mempunyai derajat kecacatan yang sangat tinggi sudah tidak bisa diberdayakan lagi dan mereka hanya bisa bergantung pada orang lain. Difabel yang mengikuti program bimbingan lanjut, mereka akan dirujuk ke Rehabilitation Center yang ada di Surakarta misalnya tuna netra, tuna rungu wicara proses bimbingannya akan di PTNTRW “Bhakti Chandrasa” Surakarta, BBRSD Surakarta.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sriyadi selaku Kepala Seksi Repesos Bagian Pemberdayaan Difabel bahwa :

“Disini kita mempunyai data orang-orang yang mengalami kecacatan dari derajat kecacatan yang rendah hingga yang tinggi. Untuk derajat kecacatan ringan,

mereka akan diberdayakan atau diberi pelatihan. Sedangkan dengan derajat kecacatan yang tinggi, mereka akan dirujuk ke RC yang ada di Solo atau Semarang.” (Wawancara, 28 Desember 2010)

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sadino selaku Pendamping Program Pemberdayaan Difabel :

“Dari sini ada program UPSK, dengan ini difabel yang mempunyai derajat kecacatan yang sangat tinggi sudah tidak bisa diberdayakan lagi dan mereka hanya bisa bergantung pada orang lain. Difabel yang mengikuti program bimbingan lanjut, mereka akan dirujuk ke Rehabilitation Center yang ada di Surakarta misalnya tuna netra, tuna rungu wicara proses bimbingannya akan di PTNTRW “Bhakti Chandrasa” Surakarta, BBRSD Surakarta”. (Wawancara, 28 Desember 2010)

c. Program Aksesibilitas

Setiap difabel berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana umum. Penyediaan aksesibilitas tersebut dapat berupa fisik, seperti jalan, rumah sakit, halte, dan lain-lain maupun berupa non fisik seperti, pelayanan informasi. Difabel berhak atas sarana dan prasarana tersebut, karena digunakan untuk memudahkan difabel untuk melakukan aktivitas di tempat umum. Seperti gedung bertingkat, harusnya disediakan jalan naik yang dapat dilalui kursi roda.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sriyadi, bahwa :

“Bagi difabel sarana-sarana umum itu merupakan hal yang penting karena selain tetapi bisa kita lihat bahwa sarana umum bagi difabel tidak memadai dan tidak menunjang bagi difabel. Contohnya saya, sekarang ini gedung dan rumah sakit banyak yang bertingkat, sehingga apabila ada keperluan atau kepentingan, sulit untuk dijangkau jadi harus memerlukan bantuan orang lain”. (Wawancara, 11 Januari 2011)

Hal yang lain juga diungkapkan oleh Bapak Sadino, bahwa :

“Bagi difabel sarana-sarana umum *commit to user* itu merupakan hal yang penting karena selain tetapi bisa kita lihat bahwa sarana umum bagi difabel tidak memadai dan tidak

menunjang bagi difabel. Selain itu juga, seperti ketika difabel hendak menggunakan angkutan umum, seperti bus, tapi sulit dikarenakan haltenya tidak memenuhi syarat untuk difabel” (Wawancara, 11 Januari 2011)

Selain itu, difabel juga berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum. Setiap difabel juga berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Selain sarana dan prasarana yang aksesibel, juga diberikan alat bantu bagi difabel untuk memudahkan mobilitas difabel seperti kursi roda, kruk ketiak, tongkat tuna netra, alat bantu dengar tuna rungu. Dengan alat bantu tersebut diharapkan difabel dapat melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses kegiatan dalam program pembangunan guna mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Gagasan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan daerah termasuk juga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasiskan pada kekuatan masyarakat setempat.

Menurut Sanit, terdapat hal-hal mendasar dan penting yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, adapun hal tersebut adalah

1. Pengembangan organisasi/ kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan masyarakat.

2. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/ organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat.
3. Kemampuan kelompok masyarakat dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan kegiatan.
4. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal.
5. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik.
6. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatnya kesejahteraan hidup serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi pembangunan.
(Sanit, 2002:53-55)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat. Dimana terjadi sebuah proses pertumbuhan segenap potensi kemandirian dan kekuatan masyarakat berkembang menjadi kekuatan nyata yang ditandai oleh perkembangan kemampuan konsisten, berpartisipasi aktif dalam politik dan pembangunan, mengorganisasikan diri secara aktif dan menentukan substansi serta arah kebijaksanaan politik (Demartoto, 2001:48). Pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat akan mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Sumodiningrat, 1999:6).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Karena pemberdayaan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Sumodiningrat, 1999:133).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan transfer ilmu kepada obyek baik masyarakat atau lembaga. Sesuai dengan pemikiran dari Mendes dalam jurnalnya:

“ Community development is generally considered to be a core component of social work practice and knowledge “

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
3. Pemberdayaan yang juga berarti melindungi.

Pemberdayaan memungkinkan proses dilakukan secara partisipatif dan berkembang sinergi antara pemerintah dengan berbagai pranata dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui perspektif pemberdayaan merupakan suatu paradigma dimana masyarakat sebagai individu bukanlah sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.

Sasaran dan tujuan dalam upaya pemberdayaan difabel di Kabupaten Karanganyar adalah:

- a. Terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan peran difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- b. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi difabel mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuan.
- c. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik.
- d. Terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial difabel.

Menurut Bapak Sriyadi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bagian pemberdayaan Difabel Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar, bahwa dalam melakukan

pemberdayaan atau meningkatkan kemampuan usaha difabel, harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jenis kecacatan
- b. Derajat kecacatan
- c. Keterampilan yang dimiliki
- d. Kesehatan
- e. Lowongan pekerjaan yang ada
- f. Jenis bidang usaha

Berdasarkan pengalaman Bapak Sadino selaku di Bidang Pemberdayaan Difabel, yang perlu diperhatikan dalam memberdayakan difabel adalah :

- a. Difabel memiliki kecacatan yang kadang-kadang berdampak pada kepribadian dan perilakunya. Seperti kurang rasa percaya diri. Dalam rangka mengeliminir masalah tersebut, maka dampak sekunder kecacatan itu harus dihilangkan. Karena kesuksesan tidak hanya menjadi monopoli orang non difabel tapi juga kaum difabel. Justru dengan kondisi kecacatan harus dimanfaatkan sebagai modal untuk mengembangkan kreatifitas diri.
- b. Difabel pada umumnya lekat dengan predikat mudah lelah, mudah menyerah dan mudah bosan. Sifat yang seperti ini harus dibuang jauh-jauh.
- c. Semangat untuk berhasil sebaiknya selalu ada pada setiap difabel yang ingin mandiri. Karena dengan semangat itulah yang akan menggerakkan difabel untuk terus berjuang demi mencapai tujuan-tujuan dari setiap usaha yang dilakukannya.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan, maka berikut ini peneliti akan menyajikan matriks mengenai program pemberdayaan difabel di Kabupaten Karanganyar :

Matriks 3

Program Pemberdayaan Difabel

Kabupaten Karanganyar

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

No	Latar Belakang	Sasaran dan Tujuan	Faktor-faktor yang diperhatikan
1	Tingkat pendidikan difabel sebagian besar rendah, sehingga sangat sulit bersaing dipasar kerja.	Terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan peran difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.	Jenis Kecacatan
2	Difabel yang pernah dilatih keterampilan hanya sedikit, sehingga difabel membutuhkan latihan dan bimbingan kerja khusus	Tersedianya peluang dan kesempatan bagi difabel mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuan.	Derajat Kecacatan
3	Akibat krisis ekonomi, difabel yang sudah bekerja selalu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akibatnya jumlah difabel yang menganggur bertambah banyak.	Terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial difabel.	Keterampilan yang dimiliki
4.	P e m		

berdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik

mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (*people or community centered development*).

Hal ini seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar yang akan peneliti sajikan berikut ini :

a. Latar Belakang

Populasi difabel yang ada di Jawa Tengah sebanyak 246.854 orang. Masih besarnya populasi tersebut disebabkan karena berbagai faktor antara lain dampak dari bencana alam, tindak kekerasan dan kecelakaan, serta kekurangberuntungan masyarakat akan keberadaan sistem sumber pelayanan yang ada.

Pemerintah sudah beritikad mendorong difabel untuk mempunyai keahlian khusus sehingga dapat berusaha sendiri, atau melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Dengan adanya kelompok usaha semacam ini, maka interaksi/ kepedulian masyarakat terhadap difabel diharapkan akan muncul. Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini dipandang baik untuk menumbuhkan iklim usaha bagi difabel. Melalui KUBE ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara difabel dengan masyarakat. Hal ini dilandasi pula oleh PP No.43 tahun 1998 pasal 33-1 yang menyatakan bahwa dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang cacat.

Program yang ditawarkan oleh pemerintah untuk difabel adalah program rehabilitasi sosial dan rehabilitasi pelatihan. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan agar difabel dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam bermasyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelatihan secara utuh dan terpadu agar difabel dapat mempunyai keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Melalui program

ini, diharapkan para difabel dapat membentuk jati diri yang lebih baik sehingga dapat diterima oleh lingkungannya. Program rehabilitasi ini menekankan perubahan sikap dan perilaku yang berlandaskan pendekatan hak asasi manusia (berdasarkan Konferensi Dasawarsa II Asia Pasifik 1993-2003). Pelayanan rehabilitasi ini sangat dibutuhkan oleh difabel yang kurang mampu atau tidak mempunyai akses pendidikan formal.

b. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat.

c. Maksud dan Tujuan Kegiatan

1) Tujuan

- a) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- b) Peningkatan pendapatan.
- c) Pengembangan usaha.
- d) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

2) Maksud

- a) Deteksi dini, konsultasi, rekomendasi dan solusi permasalahan serta penyebaran informasi mengenai PMKS maupun sistem sumber pelayanan sosial yang dapat diakses.

- b) Mendorong dan merangsang seluruh unsur masyarakat agar mau berperan aktif dalam penanganan PMKS dan difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

d. Sasaran

- 1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya para difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar yang belum terentaskan permasalahannya.
- 2) Pihak keluarga PMKS atau difabel.
- 3) Masyarakat lingkungan tempat tinggal PMKS atau difabel.
- 4) Dunia Usaha.

Menurut Bapak Parjono selaku Ketua KUBE Mekar Jaya, mengatakan bahwa :

“Sebelum difabel membentuk KUBE, difabel itu diberikan pelatihan dan keterampilan dulu, seperti menjahit, memasak, elektro, perbengkelan dan memijat. Dan pelatihan ini dilakukan kurang lebih 2 bulan, pelatihan seperti ini itu dipakai agar difabel dapat berwirausaha sendiri, ya...walaupun kecil-kecilan yang penting difabel mempunyai peluang untuk membuka usaha sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan keluarganya”. (Wawancara, 13 Januari 2011)

Untuk itu melalui Program Bantuan Kesejahteraan langkah/ kegiatan pokok pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan berusaha. Langkah ini bertujuan memberikan keterampilan berusaha yang mendatangkan penghasilan pada bidang usaha yang dipilihnya, dilaksanakan oleh petugas sosial dengan kerjasama instansi terkait.

Program pemberdayaan untuk difabel disesuaikan dengan jenis kecacatan dan derajat kecacatan difabel. Adapun jenis pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar kepada difabel di Desa Suruh, Kecamatan, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar antara lain :

1) Memasak

Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna rungu yang berminat pada keterampilan memasak dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha dibidang makanan. Sebagian besar difabel yang mengambil jenis keterampilan memasak adalah perempuan, walaupun ada beberapa laki-laki.

Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya (LBK) Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Bagi difabel yang berasal di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar biasanya mereka memilih untuk pulang selama mengikuti program pelatihan memasak yaitu datang pagi dan sorenya pulang. Akan tetapi bagi difabel yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari tempat pelatihan, biasanya mereka memilih untuk menginap di Loka Bina Karya (LBK) Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, karena di LBK juga menyediakan tempat untuk menginap bagi difabel yang sedang mengikuti pelatihan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kamiyem:

“Kulo ndherek pelatihan masak, amargi gadhah ketrampilan masak kulo saget nyambut damel piyambak, dadose mboten sah pados kerjo teng pundi-pundi. Dados cekap masak piyambak terus masakanipun ingkang dol piyambak”.
(Wawancara, 17 Januari 2011)

Artinya :

commit to user

“Dulu saya mengikuti pelatihan masak, karena dengan memiliki ketrampilan masak, saya bias bekerja sendiri, jadi tidak perlu cari kerja kemana-mana. Jadi cukup masak sendiri terus masaknya bisa di jual sendiri”.
(Wawancara, 17 Januari 2011)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Parijem :

“Saya senang mbak...bisa ikut pelatihan masak disini karena selain saya kurang bisa masak, saya juga dapat menjual masakan saya sendiri sehingga saya punya pemasukan gitu”. (Wawancara, 17 Januari 2011)

2) Menjahit

Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna wicara yang berminat pada keterampilan menjahit dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha menjahit. Sebagian besar difabel yang mengambil jenis keterampilan menjahit adalah perempuan, walaupun ada beberapa laki-laki. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya (LBK) Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Bagi difabel yang berasal di sekitar Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar biasanya mereka memilih untuk pulang selama mengikuti program pelatihan menjahit yaitu datang pagi dan sorenya pulang. Akan tetapi bagi difabel yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari tempat pelatihan, biasanya mereka memilih untuk menginap di Loka Bina Karya (LBK), karena di LBK juga menyediakan tempat untuk menginap bagi difabel yang sedang mengikuti pelatihan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hartatik, salah satu difabel yang mengikuti keterampilan menjahit :

“Disini saya diberi latihan menjahit, saya diajari membuat pola dulu, diajari memotong bahan, padahal ya mbak...saya itu gak pernah menjahit lho, tapi ya gak apa-apa, lha wong saya ingin belajar sesuatu yang baru jadi saya gak boleh ngeluh hehehe...” (Wawancara, 25 Januari 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sutarmi, bahwa :

“Berkat mengikuti pelatihan keterampilan menjahit ini, saya sekarang punya usaha menjahit sendiri di rumah dan saya juga punya penghasilan, jadi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mbak...”. (Wawancara, 25 Januari 2011)

3) Perbengkelan atau Montir.

Jenis keterampilan ini diperuntukan bagi tuna daksa dan tuna rungu wicara yang berminat pada keterampilan perbengkelan atau montir dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha perbengkelan. Sebagian besar difabel yang mengambil jenis keterampilan perbengkelan atau montir adalah laki-laki. Biasanya difabel yang pernah sekolah di STM jurusan otomotif, akan lebih cepat menguasai program pelatihan yang diajarkan oleh pendamping.

Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya (LBK). Bagi difabel yang berasal dari Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar biasanya mereka memilih untuk pulang selama mengikuti program pelatihan perbengkelan yaitu datang pagi dan sorenya pulang. Akan tetapi bagi difabel yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari tempat pelatihan, biasanya mereka memilih untuk menginap di Loka Bina Karya (LBK), karena di LBK juga menyediakan tempat untuk menginap bagi difabel yang sedang mengikuti pelatihan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutadi:

“Saya mengikuti program montir ini dikarenakan karena saya dulu sekolah di STM dan ambil jurusan otomotif jadi kalau saya mengikuti pelatihan ini saya akan lebih mudah menerima apa yang diajarkan, karena saya kan dan pernah praktek. Setelah selesai dari mengikuti pelatihan selama 3 bulan, saya berharap dapat membuka usaha sendiri di rumah, walaupun kecil-kecilan”. (Wawancara, 28 Januari 2011)

commit to user

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sandi bahwa :

“Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya LBK Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya saya belum pernah tau menahu tentang perbengkelan atau montir, jadi saya masuk pelatihan ini benar-benar dari nol, tapi setelah mengikuti pelatihan ini saya benar-benar diajarkan bagaimana caranya sehingga sekarang ini saya sudah cukup tau dan saya tekunni dengan membuka bengkel sepeda motor sendiri, begitu...”.

(Wawancara, 28 Januari 2011)

4) Elektro atau teknik audio video

Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna rungu wicara yang berminat pada keterampilan elektro dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha perbaikan barang-barang elektronik. Sebagian besar difabel yang mengambil jenis keterampilan elektro adalah laki-laki dan biasanya difabel yang pernah sekolah di STM jurusan elektro atau teknik audio video, akan lebih cepat menguasai program pelatihan yang diajarkan oleh pendamping.

Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya (LBK) Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Bagi difabel yang berasal di sekitar Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar biasanya mereka memilih untuk pulang selama mengikuti program pelatihan elektro yaitu datang pagi dan sorenya pulang. Akan tetapi bagi difabel yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari tempat pelatihan, biasanya mereka memilih untuk menginap di Loka Bina Karya (LBK) Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, karena di LBK juga menyediakan tempat untuk menginap bagi difabel yang sedang mengikuti pelatihan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparjono, salah satu difabel yang mengikuti keterampilan elektro :

commit to user

“Saya mengikuti keterampilan elektro ini karena sebelumnya saya sekolah di STM jadi apa yang diajarkan di bangku sekolah dengan yang diajarkan di pelatihan ini hampir sama, sehingga saya lebih mudah menerima untuk mempelajarinya, gitu mbak...” (Wawancara, 26 Januari 2011)

5) Memijat

Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna netra yang berminat pada keterampilan memijat dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha pemijatan. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di Loka Bina Karya (LBK) Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Bagi difabel yang berasal dari sekitar Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar biasanya mereka memilih untuk pulang selama mengikuti program pelatihan memijat yaitu datang pagi dan sorenya pulang. Akan tetapi bagi difabel yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari tempat pelatihan, biasanya mereka memilih untuk menginap di Loka Bina Karya (LBK) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, karena di LBK juga menyediakan tempat untuk menginap bagi difabel yang sedang mengikuti pelatihan. Gedung ini selain digunakan sebagai tempat pelatihan memijat bagi tuna netra juga berfungsi sebagai tempat buka praktek tuna netra yang sudah selesai mengikuti pelatihan.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Supriyono salah satu difabel yang mengikuti keterampilan memijat :

“Pelatihan memijat ini hanya diperuntukkan untuk tuna netra. Ternyata memijat itu ga gampang mbak... alias susah dan tidak boleh asal-asalan karena bias-bisa salah urut, kan bahaya mbak... untung ada pelatihan ini mbak... dengan ini saya bisa punya pekerjaan dan penghasilan sendiri. Tanpa harus membebani orang lain”. (Wawancara, 10 Oktober 2010)

commit to user

Pelatihan seperti diatas, dipakai untuk menyiapkan program kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau kelompok difabel seperti kewirausahaan. Pemberian pendampingan tentang pengembangan usaha kecil menengah atau kewirausahaan bertujuan agar difabel mampu untuk melanjutkan hidupnya secara mandiri dan tidak hanya mengharapkan belas kasihan dari pihak lain. Selain itu, pengembangan usaha kecil menengah membuka peluang/ kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana 1 kelompok terdiri dari maksimal 5 orang yang memiliki keterampilan yang sama dan bergerak di bidang yang sama. Contoh: penyandang tuna daksa yang memiliki keterampilan elektro, setelah mereka selesai mengikuti pelatihan mereka akan membentuk KUBE elektro, setelah KUBE mereka berhasil, mereka akan membuka bengkel elektro di rumah mereka masing-masing.

Modal awal untuk KUBE berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Selain bantuan modal, masing-masing KUBE difabel juga mendapatkan bantuan alat-alat kerja seperti mesin jahit, alat-alat elektro maupun peralatan bengkel. Sebenarnya, tidak ada batasan waktu untuk difabel bergabung di KUBE, asalkan mereka sudah mahir dan dirasa berhasil, mereka akan memisahkan diri dan mereka akan membuka usaha di rumah mereka masing-masing.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam program kewirausahaan ini hanya sebagai pemberi modal dan alat-alat kerja saja, sedang monitoring pelaksanaan program kewirausahaan di lapangan diserahkan langsung ke Dinas Sosial. Jadi, misalnya KUBE mengalami masalah yang berkaitan dengan kekurangan modal dan alat-alat kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

siap membantunya. Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar hanya memantau atau memonitoring keberjalanan KUBE dari laporan program kewirausahaan tersebut.

Pelatihan yang diberikan tidak semuanya berhasil. Ada beberapa difabel yang kurang terampil dan tidak terampil diakhir pelatihan, sehingga difabel masih membutuhkan bimbingan dan latihan lebih lanjut. Adapun alasan ketidakberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) disebabkan oleh:

- a) Derajat kecacatan difabel. Sebagian besar difabel yang tidak terampil ini disebabkan oleh tingginya derajat kecacatan mereka. Contohnya, tuna daksa yang hanya memiliki 1 tangan.
- b) Difabel beberapa kali tidak mengikuti pelatihan.
- c) Jumlah hari pelatihan yang sangat singkat.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan, maka berikut ini adalah matriks mengenai strategi pemberdayaan difabel melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar :

Matriks 4**Pemberdayaan Difabel****Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)****Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar**

No	Jenis Pelatihan	Kondisi di Lapangan
1	Memasak	Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna rungu yang berminat pada keterampilan memasak dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha dibidang makanan.
2	Menjahit	Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna wicara yang berminat pada keterampilan menjahit dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha menjahit.
3	Perbengkelan atau Montir	Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna daksa dan tuna rungu wicara yang berminat pada keterampilan perbengkelan atau montir dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha perbengkelan.
4	Elektro atau tekhnik audio video	Jenis keterampilan ini di peruntukkan bagi tuna daksa dan tuna rungu wicara yang berminat pada keterampilan elektro dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha perbaikan barang-barang elektronik.
5	Memijat	Jenis keterampilan ini diperuntukkan bagi tuna netra yang berminat pada keterampilan memijat dan mempunyai keinginan untuk membuka usaha pemijatan.

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

5. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Difabel Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar

a. Faktor-faktor Pendukung

1) Pendamping

a) Tugas Tim Pendamping

Pendampingan merupakan, langkah yang bertujuan menjamin kelangsungan, kemantapan, pertumbuhan dan perkembangan KUBE. Pendampingan dilaksanakan mengingat karakteristik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki keterbatasan wawasan dan akses terhadap informasi serta potensi sosial ekonomi disamping kecenderungan anggota KUBE untuk menarik diri/ keluar cukup tinggi. Pendampingan dilaksanakan oleh petugas sosial dengan koordinasi instansi terkait. Pendampingan dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota Karang Taruna atau petugas Organisasi Sosial, yang telah memperoleh pelatihan khusus serta petugas teknis instansi terkait.

Pendamping Sosial KUBE ini merupakan ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan difabel melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pendamping Sosial KUBE berperan sebagai narasumber, penggerak sekaligus sebagai fasilitator bagi pemberdayaan difabel. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, karena masih banyak pendamping sosial KUBE yang tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pendamping sosial tersebut, dimana latar belakang pendidikannya rata-rata SLTA, sehingga penguasaan dan pemahaman tentang penanganan masalah kemiskinan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif belum optimal, meskipun Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah memberikan pelatihan, pembekalan dan pemantapan kepada para pendamping sosial KUBE. Namun program pendampingan sosial ini belum berjalan efektif, karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan bahwa pendamping sosial KUBE di Kabupaten Karanganyar 80% belum dapat melaksanakan peranannya dengan baik dan apakah dengan adanya program ini difabel dapat mengelola usahanya dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang, model pendamping sosial KUBE yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sudah cukup efektif atau belum dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kesempurnaan pelaksanaan model pendamping sosial KUBE dalam pemberdayaan difabel, sehingga model pendamping sosial tersebut sesuai dengan kemampuan dan harapan dari Keluarga Binaan Sosial (KBS) maupun Pendamping Sosial KUBE sendiri.

Tugas pendamping adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data difabel khususnya yang menjadi sasaran kegiatan.
2. Melakukan identifikasi awal atau tes derajat kecacatan (semakin rendah kecacatan akan semakin memudahkan pemberian keterampilan). Tes derajat kecacatan berlaku bagi semua difabel

apapun jenis kecacatannya. Pelaksanaan tes derajat kecacatan ini bekerjasama dengan dokter ahli dari RSUD Kabupaten Karanganyar. Dari hasil tes derajat kecacatan, kemudian difabel dikelompokkan berdasarkan jenis kecacatan dan jenis derajat kecacatan.

3. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian pelatihan kepada difabel. Dalam hal ini, difabel ditawarkan program pelatihan atau jenis keterampilan yang sesuai dengan keadaan difabel. Kemudian memilih program pelatihan atau jenis keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya.
4. Memberikan pelatihan atau keterampilan-keterampilan kepada difabel sesuai dengan jenis kecacatan dan jenis derajat kecacatan.
5. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan atau pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi difabel. Pembentukan KUBE ini dilakukan setelah difabel selesai mengikuti pelatihan atau sudah terampil. Selanjutnya mereka akan dikelompokkan sesuai dengan jenis keterampilan atau keahliannya. 1 kelompok terdiri dari maksimal 5 orang.

Bapak Sadino mengatakan bahwa :

“Setelah difabel selesai mengikuti pelatihan, difabel yang ingin berwirausaha akan difasilitasi dalam bentuk KUBE. Dalam KUBE 1 kelompok terdiri dari maksimal 5 orang yang mempunyai keterampilan yang sama”. (Wawancara, 17 September 2010)

6. Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi difabel serta melakukan monitoring pelaksanaan KUBE sampai 1 tahun ke depan.

Bapak Sadino mengungkapkan bahwa :

“Selama difabel diberikan pelatihan, kita melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan, dan membuat laporan perkembangan. Selama 1 tahun kedepan”. (Wawancara, 17 September 2010)

7. Menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi difabel untuk dipertanggungjawabkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sadino bahwa:

“Hasil monitoring dan evaluasi dibukukan dan disusun menjadi buku laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui KUBE ke Pemerintah Daerah”. (Wawancara, 17 Desember 2010)

b) Kewajiban Pendamping

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pendampingan difabel, pendamping harus mampu bekerjasama dengan segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan program pemberdayaan difabel. Pendamping mempunyai peran dan posisi yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program, turut menentukan berhasil tidaknya implementasi program pada masing-masing difabel. Kepada para difabel, secara moral pendamping memiliki tanggungjawab agar kegiatan pendampingan dan pemberdayaan difabel dapat berjalan baik, agar mampu menumbuhkembangkan motivasi dan inisiatif difabel sehingga difabel bisa berkarya dan mandiri. Sedangkan kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, pendamping ini secara teknis dan admisnistrasi juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dengan baik (ada beberapa program pemberdayaan di Dinas Sosial yang bekerjasama dengan LSM), agar pelaksanaan pemberdayaan pada masing-masing difabel dan jenis

program pelatihan dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan maka berkaitan dengan tanggungjawab tersebut, pendamping memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas-tugas pendampingan kepada difabel dengan penuh tanggungjawab.
- b. Terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, baik kegiatan di lapangan maupun kegiatan dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam program pemberdayaan difabel.
- c. Terlibat secara aktif dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan pada masing-masing program pemberdayaan atau jenis keterampilan yang diikuti oleh difabel.
- d. Mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lapangan.

2) Peran Pemerintah

Pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya dalam pengentasan masalah kemiskinan bagi para difabel, antara lain melalui Program Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan bagi difabel adalah dengan pemberdayaan difabel, yaitu dengan memberikan bantuan sosial melalui bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepada Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang dikelola secara berkelompok melalui pendekatan *commit to us* Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Bantuan stimulan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang layak dan mampu melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Namun karena keterbatasan kemampuan keluarga miskin dalam mengelola bantuan sosial tersebut, aksesibilitas pemasaran, kualitas usaha dan cara usaha, maka harus dibantu dengan suatu mekanisme pendampingan baik oleh supra struktur maupun infra struktur sendiri. Karena pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Dalam rangka pemberdayaan difabel di Desa Suruh, kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai kewajiban dalam bidang :

a) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan difabel mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial selaku bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti LSM.

b) Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memberikan bantuan sosial kepada para difabel khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan sosial diarahkan untuk membantu difabel agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuhkembangkan kepedulian lingkungannya. Bantuan sosial dari Pemerintah daerah bagi difabel ini bertujuan untuk :

1. Membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar difabel.
2. Mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan difabel.
3. Mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Bantuan sosial di berikan kepada :

- a. Difabel berat yaitu difabel yang tidak mampu berusaha lagi dan hanya bergantung pada pertolongan orang lain. Contoh: penderita cacat total atau lumpuh seumur hidup.
- b. Difabel yang berasal dari keluarga tidak mampu dan belum di rehabilitasi.

Bantuan sosial berupa:

- a. Bantuan material
- b. Bantuan finansial seperti uang untuk pemenuhan sehari-hari.

- c. Bantuan fasilitas bagi difabel seperti pemberian kursi roda untuk tuna daksa, tongkat bagi tuna netra, alat pendengar bagi tuna rungu. Fasilitas tersebut dikhususkan bagi difabel yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Bantuan informasi yaitu difabel mendapatkan berbagai macam informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan. Contohnya informasi tentang pelayanan kesehatan gratis bagi difabel, informasi pemberian keterampilan, dan info-info yang berasal dari Pemerintah daerah setempat.
- c) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya pemberdayaan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar difabel dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

3) Peran Masyarakat

Sikap positif masyarakat terhadap difabel merupakan sikap mengerti, menerima, menghargai dan memperlakukan difabel secara wajar. Difabel memiliki kelemahan dan hambatan karena kelainannya. Namun demikian, difabel pasti memiliki kelebihan atau kemampuan disatu bidang yang dapat dikembangkan. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki difabel harus dihargai dan diperlakukan secara wajar. Hanya melihat kelemahan tanpa melihat kemampuan difabel akan membentuk sikap negatif. Sikap terhadap difabel bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain latar belakang keluarga, kultur dan keperibadian merupakan faktor yang amat berpengaruh dalam pembentukan sikap. Orang yang mempunyai anggota keluarga cacat cenderung

bersikap lebih positif terhadap difabel. Dalam kultur tertentu, kecacatan dianggap sebagai hal yang aneh, tidak wajar sehingga tabu untuk dibicarakan. Dengan kultur seperti ini, masyarakat umumnya bersikap lebih negatif terhadap difabel.

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi difabel. Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pemberian saran

Pemberian saran kepada Pemerintah Daerah biasanya dilakukan oleh Ketua RT atau tokoh masyarakat setempat yang ada difabel di sekitar tempat tinggalnya. Atau seseorang yang mempunyai anggota keluarga cacat, biasanya seseorang yang mempunyai saran-saran untuk kesejahteraan difabel.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Samini :

“Saya kasian banget kalau melihat difabel, kok kayaknya mereka itu di asingkan padahal mereka kan juga bagian dari masyarakat. Apalagi program pemerintah Daerah sendiri kayaknya gak berjalan dengan semestinya. Buktinya para difabel masih banyak yang terlantar. Contohnya aja, kita lihat di perempatan lampu merah, masih ada aja difabel yang mengemis dengan kaki pincang, baju kotor pokoknya gak terawat deh. Sebenarnya dana dari pemerintah itu larinya kemana sih?? Heheheee.... Heran saya hmmm...” (Wawancara, 31 Januari 2011)

2. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Masyarakat yang salah satu keluarganya ada yang mengalami kecacatan, cenderung bersikap positif terhadap difabel. Mereka memperlakukan difabel seperti itu karena masyarakat yang mempunyai keluarga yang cacat dapat merasakan bagaimana perasaan yang

dihadapi difabel. Sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai anggota keluarga yang cacat, mereka cenderung acuh tak acuh dengan difabel.

Pernyataan ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wijiyati :

“Halah mbak..mbak...orang sekarang tuh angkuh-angkuh, apalagi anak-anak muda, ah... saya gak seneng melihat mereka. Masa melihat difabel kok kesannya jijik gitu. Dan dijauhi, padahal sebagai manusia yang diberi kelengkapan, mereka gak boleh gitu. Toh...difabel kan juga manusia?? Mereka itu terkesan gak punya hati, saya aja miris mbak..mbak...kalau melihat difabel di jauhi gitu”. (Wawancara, 31 Januari 2011)

3. Pemberian lapangan kerja dan usaha bagi difabel.

Pengusaha atau pemilik lapangan kerja yang peduli dengan difabel banyak memberikan lapangan kerja untuk difabel. Khususnya setelah Dinas Sosial melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Difabel pada bulan Desember 2010 kemarin dalam rangka memperingati HIPENCA.

Hal serupa seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sriyadi :

“Kan pemerintah Daerah sudah mengupayakan suatu pemberdayaan untuk difabel, salah satunya KUBE, disini sebelum difabel membentuk KUBE, kan difabel diberi pelatihan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ini dikarenakan agar difabel sudah tidak lagi dipandang sebagai manusia lemah yang hanya meminta belaskasihan saja, tetapi mereka juga berhak bekerja di sektor perusahaan. Melihat sudah terlatihnya mereka dalam bidangnya. Dan difabel dapat disetarakan dengan orang normal pada umumnya”. (Wawancara, 12 Oktober 2010)

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, maka berikut ini adalah matriks faktor-faktor pendukung :

Matriks 5

Faktor-faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pemberdayaan Difabel

Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar

No	Faktor-faktor	Keterangan
1	Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data difabel khususnya yang menjadi sasaran kegiatan. b) Melakukan identifikasi awal atau tes derajat kecacatan (semakin rendah kecacatan akan semakin memudahkan pemberian keterampilan).. c) Memfasilitasi pelaksanaan pemberian pelatihan kepada difabel. Dalam hal ini, difabel ditawarkan program pelatihan atau jenis keterampilan yang sesuai dengan keadaan difabel. d) Memberikan pelatihan atau keterampilan-keterampilan kepada difabel sesuai dengan jenis kecacatan dan jenis derajat kecacatan. e) Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan atau pengembangan KUBE (kelompok Usaha Bersama) bagi difabel. f) Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi difabel. g) Menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi difabel untuk dipertanggungjawabkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
2	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi b) Bantuan sosial c) Pemeliharaan Kesejahteraan
3	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemberian saran b) Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. c) Pemberian lapangan kerja dan usaha bagi difabel.

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

b. Faktor-faktor Penghambat

Permasalahan yang dirasakan oleh difabel sangat kompleks. Kecacatan sebagai suatu jenis masalah sosial manusia yang mempunyai dampak yang luas. Oleh karena itu, berhubungan dengan berbagai segi kehidupan manusia baik segi ekonomi, sosial dan mental, sehingga dapat mempengaruhi taraf kesejahteraan sosial difabel, keluarganya dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu permasalahan yang paling utama yang dialami oleh difabel adalah kecenderungan tumbuhnya ketergantungan kepada orang lain atau lingkungan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup, perawatan maupun hal-hal lain yang sangat primer, sehingga merupakan beban orang lain. Untuk mengatasi ketergantungan difabel kepada orang lain, maka difabel perlu mendapatkan pemberdayaan atau pelatihan keterampilan. Pemberdayaan bagi difabel sangat penting dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahliannya. Difabel harus segera diberi pelatihan dan keterampilan dibidang tertentu yang disesuaikan dengan kondisi atau jenis kecacatan masing-masing. Disamping itu, pelatihan dan keterampilan kepada difabel harus diarahkan untuk kemampuan kemandirian mereka, motivasi untuk dapat berkiprah di pasaran tenaga kerja.

Pada umumnya permasalahan yang biasanya dihadapi oleh difabel adalah sebagai berikut :

- a) Hambatan pada pola perilaku dan gerak langkah, yakni dinamika tingkah laku dalam sikap dan gerak dapat menggambarkan suasana kehidupan perasaan, daya khayal dan cita-cita seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari difabel mengalami hambatan-hambatan antara lain kelambanan

bergerak dan komunikasi tergantung derajat kecacatan, tergantung pada orang lain.

Bapak Sugiyarto menyatakan bahwa :

“Selama mengikuti pelatihan ini, saya menemukan hambatan tapi gak besar kok, cuma kadang saya kalau kerja gak bisa cepat, lha kan mbak tau sendiri kalau kaki saya ini cuma satu apalagi saya ini mengikuti pelatihan bengkel yang menuntut saya harus banyak gerak, ya walaupun sebenarnya mungkin tidak cocok buat saya, tapi saya paling tertarik dengan pelatihan ini mbak...” (Wawancara, 7 Januari 2011)

Seperti juga yang diungkapkan oleh Bapak Suparjono :

“Hambatan saya ketika mengikuti pelatihan ini tuh, karena saya kalau kemana-mana harus menggunakan kruk mbak...jadi gak bisa cepat kalau mau beraktivitas, gitu...” (Wawancara, 7 Januari 2011)

- b) Masalah pekerjaan dan ekonomi yakni orang yang mengalami kecacatan dan mengalami kesusahan dalam bekerja. Kecacatan merupakan penyebab timbulnya kesukaran untuk melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak cacat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supriyono, bahwa :

“Saya kan tuna netra jadi gak bisa melakukan pekerjaan lain selain mengikuti pelatihan keterampilan memijat, lagian mana ada sih mbak perusahaan yang mau mempekerjakan orang buta seperti saya ini. Saya juga sadar kok mbak, kalau saya bekerja ikut orang, juga gak bisa ngapa-ngapain. Dengan keterampilan memijat yang saya miliki, sekarang saya bisa punya penghasilan sendiri dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”. (Wawancara, 7 Januari 2011)

Seperti juga yang diungkapkan oleh Ibu Sutarmi :

“Sebelum saya ikut pelatihan menjahit, saya hanya ibu rumah tangga yang Cuma mengurus anak di rumah hehee... tapi sekarang saya bisa punya penghasilan dan dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya saya bersyukur mbak... karena saya bisa jadi tukang jahit”. (Wawancara, 9 Januari 2011)

- c) Masalah sosial, yakni dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, maka mata pencahariannyapun hilang. Hal ini membawa kegoncangan fungsional khususnya kepada seseorang difabel yang tadinya berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena sekarang tidak dapat melakukan tugasnya lagi. Jadi masalah sosial yang timbul karena kecacatan yang disandang oleh seseorang dapat terjadi dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparjono, bahwa :

“Saya tuh udah tidak berguna lagi mbak... apalagi setelah kaki saya diamputasi, rasanya tuh hidup dah berakhir. Kan saya punya tanggungan kerja, jadi gak mungkin kalau saya hanya diam di rumah. saya kerja juga tidak dapat gaji yang besar mbak... “. (Wawancara, 7 Januari 2011)

- d) Masalah psikologis, yakni kesukaran dalam ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan hubungan sosial dengan masyarakat seringkali menjadi demikian berat, sehingga menimbulkan gejala gangguan kejiwaan yang dapat mengganggu kesehatan jiwa difabel. Rasa minder kerap kali mendera para difabel ketika harus berinteraksi dengan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sandi :

“Saya merasa malu mbak ketika bertemu dengan orang lain karena bagian tubuh saya tidak lengkap, apalagi sekarang saya bekerja dengan penghasilan yang tidak banyak, jadi mau tidak mau isteri saya juga harus ikutan bekerja agar kebutuhan hidup kami dapat terpenuhi”. (Wawancara, 9 Januari 2011)

Demikian juga yang diungkapkan oleh Bapak Suparjono :

“Masalah yang paling berat yang dihadapi oleh difabel itu adalah masalah jodoh mbak... kan tidak semua orang mau menerima setiap kekurangan pasangannya. Seperti halnya difabel, orang normal mana mau menikah dengan penyandang cacat. Pasti maunya yang sesame mbak... dulu saya waktu saya mau menikah, orang tua istri saya tidak merestui, dikarenakan saya ini cacat, jadi keluarga *commit to user* saya tuh malu mbak dengan tetangga atau saudara-saudara yang lain”. (Wawancara, 7 Januari 2011)

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti peroleh di lapangan, maka matriks mengenai faktor-faktor penghambat, sebagai berikut :

Matriks 6

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pemberdayaan Difabel

Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar

No	Faktor-faktor Penghambat	Keterangan
1	Hambatan pada pola perilaku dan gerak langkah.	Hambatan pada pola perilaku dan gerak langkah, yakni dinamika tingkah laku dalam sikap dan gerak dapat menggambarkan susunan kehidupan perasaan, daya khayal dan cita-cita seseorang
2	Masalah pekerjaan dan ekonomi	Kecacatan merupakan penyebab timbulnya kesukaran untuk melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang normal.
3	Masalah sosial	Masalah sosial, yakni dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, maka mata pencahariannyapun hilang. Hal ini membawa kegoncangan fungsional khususnya kepada seseorang difabel yang tadinya berkedudukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga karena sekarang tidak dapat melakukan tugasnya lagi
4	Masalah psikologis	Masalah psikologi, yakni kesukaran dalam ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan hubungan sosial dengan masyarakat seringkali menjadi demikian berat, sehingga menimbulkan gejala gangguan kejiwaan yang dapat mengganggu kesehatan jiwa difabel. Rasa minder kerap kali mendera para difabel ketika harus berinteraksi dengan masyarakat. <i>commit to user</i>

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

6. Dampak Pemberdayaan Difabel dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Pemberdayaan memungkinkan proses dilakukan secara partisipatif dan berkembang sinergi antara pemerintah dengan berbagai pranata dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui perspektif pemberdayaan merupakan suatu paradigma dimana masyarakat sebagai individu bukanlah sebagai pelaku yang menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.

Pemberdayaan yang dilakukan melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, mempunyai 3 macam dampak yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak aksesibilitas.

1. Dampak Psikologis

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sangat membantu untuk memberikan semangat dan motivasi kepada difabel sehingga mereka tidak lagi merasa hina akan keberadaannya. Bimbingan selain diberikan oleh Dinas Sosial juga dilakukan oleh difabel lama yang juga merupakan pengurus (ada paguyuban difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar). Diharapkan bimbingan psikologis dari difabel lama yang tetap eksis dan survive dengan keberadaan mereka sehingga difabel lama dapat mengangkat moral dari para difabel.

Seperti yang diungkapkan Bapak Supriyono (tuna daksa) :

“Dengan adanya Program Kelompok Usaha Bersama ini, kami sebagai penyandang cacat sudah tidak lagi merasa malu apabila keluar rumah dan bergaul dengan tetangga yang normal. Dalam program ini selain diberikan pelatihan dan keterampilan, tetapi juga diberikan bimbingan motivasi agar

kami orang cacat tidak lagi dipandang sebagai manusia yang lemah, yang hanya bisa meminta belaskasih kepada orang lain yang normal. Dan bahwa orang normal dan cacat itu tidak ada bedanya apalagi dimata Allah.” (Wawancara, 7 Januari 2011)

Selain bimbingan psikologi untuk difabel, Program Pemberdayaan Difabel melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga diberikan penyuluhan kepada keluarga difabel dan masyarakat mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan kecacatan seperti isu kecacatan, penanaman pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang difabilitas serta penanaman sensitivitas terhadap difabel.

2. Dampak Aksesibilitas

Pemberian alat bantu untuk memudahkan difabel dalam hal mobilitas seperti kursi roda, tongkat tuna netra, dan kruk. Selain itu, juga dilakukan advokasi tentang aksesibilitas difabel tentang sarana umum yang kurang menunjang bagi difabel.

Hal ini seperti yang dinyatakan Bapak Sutadi, difabel dengan salah satu kakinya diamputasi :

“Dengan adanya program ini, saya senang mbak...karena saya mendapat bantuan kruk, jadi saya sudah tidak lagi kesulitan untuk berjalan dan kemana bisa sendiri tidak selalu merepotkan orang lain hehee...”. (Wawancara, 11 Januari 2011)

Sementara itu Ibu Hartatik menyatakan :

“Saya senang mbak... mendapat bantuan kursi roda. Mengingat kedua kaki saya tidak bisa berjalan jadi kemana-mana harus ngelesot, tapi sejak adanya kursi roda, saya sudah tidak lagi kesulitan apabila mau kemana-mana.” (Wawancara, 11 Januari 2011)

3. Dampak Ekonomi

Dalam hal ini peran penguatan potensi diri difabel, dengan adanya pelatihan atau keterampilan bagi difabel yang didasarkan pada jenis kecacatannya seperti keterampilan menjahit, memasak, teknik elektro audio, perbengkelan, memijat dan lain-lain. Dan pelatihan atau keterampilan tersebut banyak memberikan dampak positif bagi para difabel. Difabel lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, sehingga difabel dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya dan keluarganya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugiyarto :

“Sebelum membentuk KUBE, saya diberi keterampilan dan pelatihan. Disini saya mengikuti keterampilan perbengkelan. Dengan keterampilan memijat yang saya miliki, sekarang saya bisa mempunyai penghasilan sendiri dengan membuka bengkel motor di rumah”. (Wawancara, 7 Januari 2011)

Hal ini didukung oleh pernyataan Sandi :

“Saya senang banget mbak...sekarang saya bisa menghidupi keluarga saya dengan membuka toko kelontong di rumah, ya...walaupun cuma kecil-kecilan tapi saya dah bersyukur dan berterimakasih banget mbak...”. (Wawancara, 9 Januari 2011)

Berdasarkan data dan informasi yang peneliti peroleh di lapangan, maka berikut adalah matriks mengenai Dampak Pemberdayaan Difabel dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar :

Matriks 7

Dampak Program Pemberdayaan Difabel

Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar

No	Dampak	Keterangan Dampak
1	Dampak Psikologis	Program Kelompok Usaha Bersama sangat membantu untuk memberikan semangat dan motivasi kepada difabel sehingga mereka tidak lagi merasa hina akan keberadaannya. Bimbingan selain diberikan oleh Dinas Sosial juga dilakukan oleh difabel lama yang juga merupakan pengurus (ada paguyuban difabel Kabupaten Karanganyar).
2	Dampak Aksesibilitas	Pemberian alat bantu untuk memudahkan difabel dalam hal mobilitas seperti kursi roda, tongkat tuna netra, dan kruk. Selain itu, juga dilakukan advokasi tentang aksesibilitas difabel tentang sarana umum yang kurang menunjang bagi difabel.
3	Dampak Ekonomi	Dalam hal ini peran penguatan potensi diri difabel, dengan adanya pelatihan atau keterampilan bagi difabel yang didasarkan pada jenis kecacatannya seperti keterampilan menjahit, memasak, teknik elektro audio, perbengkelan, memijat dan lain-lain. Pelatihan atau keterampilan tersebut banyak memberikan dampak positif bagi para difabel. Difabel lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain, sehingga difabel dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dirinya dan keluarganya.

Sumber : Data primer diolah Januari 2011

B. PEMBAHASAN

Pemberdayaan difabel menjadi fokus penelitian ini memberikan suatu pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut memberikan kesempatan dan dorongan bagi difabel untuk mengembangkan usahanya dengan saling bertukar informasi, keahlian dan mencari kekurangan mereka dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan keahlian yang dimiliki.

Upaya melakukan pemberdayaan difabel melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, hal pertama yang peneliti lakukan adalah mengkajinya dengan teori aksi. Pada tahap ini difabel diberdayakan dengan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan difabel lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan difabel agar nantinya difabel dapat memberdayakan dirinya sendiri secara mandiri. Difabel sebagai peserta program pemberdayaan difabel melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar mempunyai motivasi dan latar belakang yang berbeda, sehingga difabel tidak mungkin menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan secara keseluruhan. Dengan demikian totalitas keseluruhan dari materi pembelajaran, pendidikan umum dan pendidikan keterampilan dan pelatihan yang diberikan kepada difabel tidak sepenuhnya mungkin bisa dipahami.

Jika dikaji dengan menggunakan teori aksi tersebut disini difabel adalah sebagai aktor yang memburu suatu tujuan yaitu bertujuan untuk memberdayakan difabel. Dalam memburu tujuannya tersebut pendamping mempunyai alternatif cara atau alat untuk sampai kepada tujuannya tersebut. Cara atau alat tersebut diimplementasikan dalam program-program yang dijalankan dalam rangka memberdayakan difabel. *commit to user*

Max Weber menyarankan dengan dua cara yaitu dengan kesungguhan dan dengan mencoba mengenangkan dan menyelami pengalaman si aktor. Menurut Max Weber, semakin rasionalitas suatu tindakan sosial maka semakin mudah tindakan itu ditafsirkan dan dipahami. Sedangkan nilai-nilai dalam pendidikan pada prinsipnya terkandung tindakan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik dari sekarang dan sudah pada tingkat *zwrek rational*, karena difabel yang diberi pelatihan di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dapat membedakan secara rasional tindakan yang seharusnya dilakukan dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dalam menuntut ilmu. Disamping itu juga, untuk mengetahui kalau cara-cara yang mereka pilih bisa mencapai tujuan. Dalam pelatihan ini, tidak semua difabel mampu menyerap materi-materi pembelajaran, pendidikan yang diajarkan didalam maupun diluar panti.

Empowerment (pemberdayaan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual maupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi, politik pada seorang difabel. Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, diantaranya meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat.

Analisis pemberdayaan terhadap difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar harus dilakukan melalui tiga cara pemberdayaan, yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dapat berkembang.

Dalam upaya memberdayakan difabel atau dalam memberikan pelatihan kepada difabel harus menggunakan *commit to user* suasana yang penuh perhatian dan kasih

sayang serta adanya suasana harmonis. Setiap pendamping memperlakukan difabel secara sama dan tidak pilih kasih. Pendamping harus sabar dalam memberikan pelatihan dan keterampilan kepada difabel.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sadino selaku pendamping :

“Mbak...kita itu harus super sabar kepada difabel dalam memberi pelatihan, karena mereka itu sensitif banget mbak... dan juga punya potensi yang berbeda jadi tidak bisa disamakan dengan difabel yang sudah pintar. Selain itu kita juga harus menciptakan suasana yang bersahabat jadi seperti keluarga sendiri gitu...”
(Wawancara, 31 Desember 2010)

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.

Program pemberdayaan yang dilakukan dalam memberdayakan difabel ternyata mempunyai dampak yang positif, terbukti dapat memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh difabel dengan diberikan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan difabel sesuai dengan jenis kecacatan difabel itu.

Menurut Bapak Sadino :

“Adanya pelatihan dan keterampilan yang diberikan oleh difabel ternyata membawa dampak positif lho mbak... jadi difabel itu mempunyai keterampilan sesuai dengan jenis kecacatannya. Yang dulunya tidak bisa apa-apa, sekarang bisa punya sesuatu yang dapat menghasilkan”.
(Wawancara, 31 Desember 2010)

- 3) Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sriyadi, bahwa :

“Dalam upaya memberdayakan difabel, Pemerintah Daerah sudah memiliki Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Penyandang Cacat. Hal ini dikarenakan agar difabel menjadi orang yang tidak dianggap lemah atau terpinggirkan, sehingga masyarakat tidak lagi memandang difabel dengan sebelah mata". (Wawancara, 3 Januari 2011)

Berdasarkan analisis diatas, maka berikut ini adalah matriks cara pemberdayaan difabel :

Matriks 8

Analisis Cara Pemberdayaan Difabel

No	Cara Pemberdayaan	Kondisi di Lapangan
1	Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dapat berkembang.	Dalam upaya memberdayakan difabel atau dalam memberikan pelatihan kepada difabel harus menggunakan suasana yang penuh perhatian dan kasih sayang serta adanya suasana harmonis. Setiap pendamping memperlakukan difabel secara sama dan tidak pilih kasih. Pendamping harus sabar dalam memberikan pelatihan dan keterampilan kepada difabel.
2	Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.	Program pemberdayaan yang dilakukan dalam memberdayakan difabel ternyata mempunyai dampak yang positif, terbukti dapat memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh difabel dengan diberikan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan difabel sesuai dengan jenis kecacatan difabel itu.
3	Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.	Dalam upaya memberdayakan difabel, Pemerintah Daerah sudah memiliki Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Hal ini dikarenakan agar difabel menjadi orang yang tidak dianggap lemah atau terpinggirkan, sehingga masyarakat tidak lagi memandang difabel dengan sebelah mata.

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

commit to user

Analisis prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

Program pemberdayaan difabel melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara anggota, pengurus, pendamping maupun difabel. Semuanya dapat menjalankan perannya masing-masing, termasuk difabel sebagai pihak yang diberdayakan. Difabel sungguh-sungguh dan serius dalam mengikuti program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama.

- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

Dalam proses pemberdayaan, disini difabel ditempatkan sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Difabel diposisikan sebagai pihak yang kompeten, harapannya difabel menjadi orang yang mempunyai kelebihan dibalik kekurangannya. Sehingga pelatihan keterampilan yang diikuti dapat merubah difabel menjadi orang yang ahli di suatu bidang tertentu dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang disekitarnya. Sehingga dengan keterampilan yang difabel miliki mereka mempunyai kesempatan untuk membuka dunia usaha dan berani bersaing dengan masyarakat non difabel yang lain.

- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

Dalam program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini peserta adalah difabel. Difabel harus melihat diri mereka sendiri

sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Jadi difabel memanfaatkan apa yang menjadi kelemahannya menjadi kelebihanannya. Difabel dengan potensi yang dimilikinya dapat melakukan perubahan untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang disekitarnya menjadi lebih baik. Contohnya dibidang ekonomi, dengan potensi yang dimiliki oleh setiap difabel, maka mereka bisa meningkatkan kesejahteraan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

Kompetensi difabel diperoleh ketika mereka mengikuti pelatihan keterampilan. Sebagian besar difabel belum memiliki keterampilan apa-apa. Setelah lulus dan selesai dari mengikuti pelatihan keterampilan, mereka mengembangkan sendiri keahlian mereka, ada yang bergabung dengan perusahaan lain tetapi ada juga yang membuka usaha sendiri dengan bergabung di Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dengan kompetensi yang dimilikinya difabel dapat mengembangkan usaha mereka

- e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

Dalam mengikuti pelatihan keterampilan, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi difabel. Dari permasalahan yang dihadapi difabel tersebut, mereka dituntut menyelesaikan masalahnya sendiri.

- f. Jaringan-jaringan sosial informasi merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

Pengalaman difabel lama juga dirasa diperlukan untuk menumbuhkembangkan semangat bagi difabel yang baru bergabung dalam

KUBE. Diharapkan bimbingan dari difabel lama yang tetap eksis dan survive dengan keadaan mereka sehingga difabel lama dapat mengangkat moral dari para difabel ini.

- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

Difabel selaku peserta program pemberdayaan difabel berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan untuk mereka sendiri baik tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Pendamping hanya berperan sebagai fasilitator saja, keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan ada ditangan difabel sebagai obyek yang diberdayakan.

- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan difabel, difabel sebagai peserta program pemberdayaan difabel, kenyataan di lapangan menunjukkan mereka sungguh-sungguh, serius dalam mengikuti program pelatihan. Dengan kesadaran diri difabel sendiri pelaksanaan program pemberdayaan akan berjalan lebih mudah dan akan menghasilkan output yang bagus.

- i. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

Pemberdayaan yang bersifat monoton akan membuat difabel mudah bosan dan hasil dari pemberdayaan tidak bisa maksimal. Pemberdayaan yang bersifat dinamis antara lain seperti banyaknya program pemberdayaan yang diikuti difabel. Dengan beragamnya program pemberdayaan tersebut diharapkan difabel

akan lebih mudah berkembang. Difabel juga dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan analisis diatas, maka berikut ini matriks prinsip pemberdayaan difabel :



Matriks 9

Prinsip Pemberdayaan Difabel

No	Prinsip Pemberdayaan	Kondisi di Lapangan
1	Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai patner.	Program pemberdayaan difabel melalui Kelompok Usaha Bersama dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antara anggota, pengurus, pendamping maupun difabel.
2	Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai actor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.	Dalam proses pemberdayaan, disini difabel ditempatkan sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Difabel diposisikan sebagai pihak yang kompeten, harapannya difabel menjadi orang yang mempunyai kelebihan dibalik kekurangannya.
3	Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.	Dalam program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha bersama ini. Peserta adalah difabel. Difabel harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. Jadi difabel memanfaatkan apa yang menjadi kelemahannya menjadi kelebihannya.
4	Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.	Kompetensi difabel diperoleh ketika mereka mengikuti pelatihan keterampilan. Sebagian besar difabel belum memiliki keterampilan apa-apa. Setelah lulus dan selesai dari mengikuti pelatihan keterampilan, mereka mengembangkan sendiri keahlian mereka, ada yang bergabung dengan perusahaan lain tetapi ada juga yang membuka usaha sendiri dengan bergabung di Kelompok Usaha Bersama. Dengan kompetensi yang dimilikinya difabel dapat mengembangkan usaha mereka.
5	Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.	Dalam mengikuti pelatihan keterampilan, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi difabel. Dari permasalahan yang dihadapi difabel tersebut, mereka dituntut menyelesaikan masalahnya sendiri.

6	Jaringan-jaringan sosial informasi merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengandalikan seseorang.	Pengalaman difabel lama juga dirasa diperlukan untuk menumbuhkembangkan semangat bagi difabel yang baru bergabung dalam KUBE. Diharapkan bimbingan dari difabel lama yang tetap eksis dan survive dengan keadaan mereka sehingga difabel lama dapat mengangkat moral dari para difabel ini.
7	Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.	Difabel selaku peserta program pemberdayaan difabel berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan untuk mereka sendiri baik tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Pendamping hanya berperan sebagai fasilitator saja, keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan ada ditangan difabel sebagai obyek yang diberdayakan.
8	Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.	Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan difabel, difabel sebagai peserta program pemberdayaan difabel, kenyataan di lapangan menunjukkan mereka sungguh-sungguh, serius dalam mengikuti program pelatihan. Dengan kesadaran diri difabel sendiri pelaksanaan program pemberdayaan akan berjalan lebih mudah dan akan menghasilkan output yang bagus.
9	Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.	Pemberdayaan yang bersifat monoton akan membuat difabel mudah bosan dan hasil dari pemberdayaan tidak bisa maksimal. Pemberdayaan yang bersifat dinamis antara lain seperti banyaknya program pemberdayaan yang diikuti difabel. Dengan beragamnya program pemberdayaan tersebut diharapkan difabel akan lebih mudah berkembang.

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

Adapun strategi pemberdayaan dalam konteks pekerjaan sosial dapat dianalisa menggunakan tiga asas pemberdayaan (*empowerment setting*) : mikro, mezzo, dan makro, sebagai berikut:

a. Asas Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

Program pemberdayaan difabel sebelum membentuk Kelompok Usaha bersama (KUBE) bersifat individual, yakni terlihat dengan adanya beberapa pelatihan seperti pelatihan menjahit, memasak, kelompok musik, elektro, memijat dan bengkel motor. Tujuan dari program pelatihan tersebut yakni setiap difabel dapat mengasah dan meningkatkan kemampuannya agar dapat hidup mandiri. Disamping itu, difabel juga diberi bimbingan yang terangkum dalam program rehabilitasi yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan difabel agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, program rehabilitasi juga diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial difabel agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Program rehabilitasi itu antara lain program motivasi, bimbingan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan lanjutan dan bimbingan sosial.

b. Asas Mezzo.

commit to user

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya dilakukan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Program pemberdayaan yang bersifat kolektif atau kelompok adalah KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE sebagai upaya pengembangan usaha kecil menengah atau kewirausahaan bertujuan agar difabel mampu untuk melanjutkan hidupnya secara mandiri dan tidak hanya mengharapkan belas kasihan dari pihak lain. Selain itu, pengembangan usaha kecil menengah membuka peluang/ kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Antara lain: mereka membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana 1 kelompok terdiri dari maksimal 5 orang yang memiliki keterampilan yang sama dan bergerak di bidang yang sama. Contoh: penyandang tuna daksa yang memiliki keterampilan elektro, setelah mereka selesai mengikuti pelatihan mereka akan membentuk KUBE elektro, setelah KUBE mereka berhasil, mereka akan membuka bengkel elektro di rumah mereka masing-masing.

Oleh karena itu, ketika mereka tergabung dalam KUBE, mereka harus saling bekerjasama, saling melengkapi satu sama lain dan ketika mereka mempunyai masalah dalam menjalankan KUBE mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

c. Asas Makro.

Pendekatan ini disebut juga strategi sistem besar (*large- system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijaksanaan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying,

pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dalam asas makro ini hal yang sudah dilakukan adalah aksi sosial. Dimana aksi yang dilakukan adalah melakukan penyadaran yang dilakukan secara insidental misalnya memanfaatkan Hari Penyandang Cacat Sedunia (HIPENCA) yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Hal ini dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar bahwa difabel juga bagian dari masyarakat Kabupaten Karanganyar, yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat non difabel sehingga tidak perlu ada diskriminasi antara masyarakat non difabel dengan masyarakat difabel di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, kegiatan pawai juga menunjukkan bahwa difabel juga bisa hidup mandiri dan yang tidak selamanya bergantung pada orang lain.

Berdasarkan analisis diatas, maka berikut ini adalah matriks analisis tiga asas pemberdayaan difabel :

Matriks 10

Analisis Tiga Asas Pemberdayaan Difabel

No	Tiga Asas Pemberdayaan	Kondisi di Lapangan
1	Mikro	Dalam asas mikro ini program pemberdayaan yang dilakukan difabel bersifat individual, yakni terlihat dengan adanya beberapa pelatihan seperti pelatihan menjahit,

		memasak, kelompok music, elektro, memijat dan bengkel motor. Sehingga dari program pelatihan tersebut setiap difabel dapat mengasah dan meningkatkan kemampuannya agar dapat hidup mandiri.
2	Mezzo	Dalam asas mezzo ini program pemberdayaan yang dilakukan bersifat kolektif atau kelompok adalah KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE sebagai upaya pengembangan usaha kecil menengah atau kewirausahaan bertujuan agar difabel mampu untuk melanjutkan hidupnya secara mandiri dan tidak hanya mengharapkan belas kasihan dari pihak lain.
3	Makro	Dalam asas makro ini hal yang sudah dilakukan adalah aksi sosial. Dimana aksi yang dilakukan adalah melakukan penyadaran yang dilakukan secara incidental misalnya memanfaatkan hari penyandang cacat sedunia (HIPENCA) yang jatuh pada tanggal 3 Desember.

Sumber : Data primer, diolah Januari 2011

BAB V

PENUTUP

Pada bagian terakhir ini, penulis akan memaparkan secara singkat kesimpulan yang telah diperoleh setelah melakukan penelitian ini. Selain itu penulis juga memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan.

A. KESIMPULAN

Pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar bersifat menyeluruh meliputi pemberdayaan yang bersifat mental, fisik maupun kemampuan sosial difabel. Strategi yang digunakan adalah dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat-alat kerja yang dapat menunjang difabel untuk mengembangkan keterampilan.

Pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar secara garis besar yaitu peran pendampingan dan peran penguatan potensi diri difabel. Pendamping mempunyai peran untuk memantau kondisi dampingan dan berupaya mencari solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi difabel. Peran penguatan potensi diri, berupaya untuk menggali potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing difabel kemudian berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh difabel.

Pemberdayaan difabel melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan untuk memberdayakan difabel adalah dengan memberikan berbagai macam training keterampilan dan kewirausahaan untuk kemudian bisa dikembangkan oleh difabel sendiri, seperti pelatihan keterampilan menjahit yang diperuntukkan bagi difabel

tuna daksa dan tuna rungu wicara yang ingin bisa menjahit. Selain memberikan pelatihan dan pendampingan strategi, juga dengan memberikan modal dan peralatan bagi difabel yang sudah mahir dan ingin membuka usaha sendiri. Dengan usaha yang mereka lakukan, difabel bisa hidup mandiri dari segi ekonomi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri maupun kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemampuan psikologi difabel dapat menumbuhkan semangat baru bagi difabel untuk tetap eksis dan survive dengan keadaan mereka sebagai difabel, selain itu juga untuk mengangkat moral difabel maupun kemampuan sosial difabel yaitu kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi difabel dengan masyarakat sekitarnya.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Empiris

Pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memberdayakan difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar menjadi mandiri. Beberapa program pemberdayaan ditawarkan kepada difabel sesuai dengan minat, jenis kecacatan dan derajat kecacatan difabel sehingga difabel bisa mandiri. Akan tetapi pendamping hanya bisa memberikan pemberdayaan kepada difabel dengan derajat kecacatan tinggi. Difabel yang tidak berhasil dalam proses pemberdayaan belum ada solusi atau bentuk pemberdayaan lain yang lebih tepat sehingga mereka juga bisa mandiri. Dalam penelitian ini penulis belum mendapatkan informasi mengenai cara berinteraksi antar difabel yang berbeda jenis kecacatan misalnya tuna netra dengan tuna rungu wicara atau tuna daksa dengan tuna rungu wicara. Selain itu penulis juga belum mengetahui

tingkat kemandirian difabel lain yang tidak mengikuti program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori aksi yang tergabung dalam paradigma definisi sosial yang menekankan pada tindakan sosial dari Max Weber. Bagi Weber, pokok persoalan sosiologi adalah bagaimana memahami tindakan sosial antar hubungan sosial dimana “tindakan penuh arti” itu ditafsirkan untuk sampai pada penjelasan kausal. Untuk memahami tindakan kausal ini, Weber menganjurkan metode analitiknya melalui pemahaman dan penafsiran (*interpretative understanding*) yang *verstehen*.

Dalam teori aksi ini aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkan dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menerapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih. *Voluntarisme* adalah kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Konsep inilah yang menetapkan teori aksi Parsons ke dalam paradigma definisi sosial.

Jika dipandang dengan menggunakan teori aksi tersebut disini difabel adalah sebagai aktor yang memburu suatu tujuan yaitu bertujuan untuk memberdayakan difabel. Dalam memburu tujuannya tersebut pendamping mempunyai alternatif cara atau alat untuk sampai kepada tujuannya tersebut. Cara atau alat tersebut diimplementasikan dalam program-program yang dijalankan dalam rangka memberdayakan difabel.

Teori ini sudah cukup sesuai dan mewakili untuk hasil temuan ini. Karena penulis memandang bahwa difabel adalah sebagai aktor yang memburu suatu tujuan yaitu bertujuan untuk memberdayakan difabel. Sedangkan cara atau alat untuk

mencapai tujuan implementasikan dalam program-program yang dijalankan dalam rangka memberdayakan difabel.

3. Implikasi Metodologis

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini berusaha untuk memaparkan tentang pemberdayaan difabel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar

Dalam teknik pengumpulan data, penulis berperan sebagai *human instrument* yang turun ke lapangan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data. Pengumpulan data dilakukan baik interaktif maupun non interaktif. Metode wawancara mendalam dan observasi berperan digunakan untuk metode interaktif sedangkan catatan dokumen dan observasi tak berperan digunakan untuk metode non interaktif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa sampel-sampel tersebut dapat mewakili apa yang dimaksudkan dalam tujuan penelitian. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan memilih informan yang benar-benar tahu permasalahan penelitian.

Informasi dalam penelitian ini berasal dari kedua belah pihak yaitu pihak yang melakukan pemberdayaan dan pihak yang mendapatkan pemberdayaan sebagai responden. Pihak yang memberi pemberdayaan adalah dari Pemerintah Daerah. Sedangkan pihak yang mendapatkan pemberdayaan difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, penulis mewawancarai 10 orang difabel yang terdiri dari 9 tuna daksa dan 1 tuna netra. Selain itu penulis juga mewawancarai keluarga difabel, masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karanganyar sebagai informan. Akan tetapi ketika berada di lapangan penulis mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan responden dan informan.

Teknik analisa dilakukan dengan teknik analisis komparatif yaitu dengan jalan melakukan perbandingan antara indikator keberdayaan dengan pemberdayaan yang telah dilakukan, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian masih berlangsung. Dalam pengumpulan data penelitian, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara langsung. Begitu data diperoleh, selanjutnya secepat mungkin penulis mengolahnya.

4. Implikasi Kebijakan

Sebagai penutup dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Difabel Dalam Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar ini penulis mengajukan beberapa saran yang bisa dipertimbangkan dan ditindaklanjuti yaitu :

1. Bagi pemerintah agar dijadikan masukan dalam hal penanganan masalah sosial terutama dalam hal pemberdayaan difabel. Oleh karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan kaum difabel yang juga merupakan warga negara Menurut UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa difabel merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di semua sisi kehidupan yang juga harus mendapat akses seluas-luasnya terhadap pembangunan.

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, tetapi implementasi dari Undang-Undang tersebut masih sangat jauh dari yang seharusnya. Dalam hal aksesibilitas saja difabel masih mengalami kekerasan struktural karena banyak sekali fasilitas umum seperti gedung pemerintahan yang

bertingkat, selain itu sarana dan prasarana lainnya seperti rumah sakit, sekolah, pasar dan lain sebagainya banyak yang tidak dapat diakses oleh difabel.

2. Bagi Pemerintah Daerah, agar wacana dan kajian dari pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kembali melakukan pemberdayaan karena difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar masih memerlukan banyak sekali pendampingan. Selain itu, program pemberdayaan akan menjadi hasil yang baik jika dilakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan difabel di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dapat mandiri.
3. Terakhir, bagi peneliti-peneliti lain yang berminat untuk meneliti tentang difabel maupun penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan difabel, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi tertulis yang bermanfaat.